



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



2025 - 2029

Rencana Strategis

POLITEKNIK KELAUTAN
DAN PERIKANAN
KARAWANG

BerAKHLAK  **bangga
melayani
bangsa**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Poltekkp_Karawang



@Poltek_Karawang



Poltekkpkarawang



Perikanan Karawang



@poltekkpkarawang.ac.id

**KETETAPAN DIREKTUR
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG
NOMOR: B.3645/POLTEK.KRW/HM.510/XII/2024
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG
TAHUN 2025 – 2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelarasan program dan kegiatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan redesain sistem perencanaan dan penganggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan menetapkan Peraturan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Nomor 2195/PER-BPPSDM.4/2024 tentang Rencana Strategis Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Ketetapan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang tentang Rencana Strategis Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan;
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengesahan Internasional Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel 1995 (Konvensi Internasional Tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/PERMEN-KP/2021 Tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang.

MENETAPKAN

- PERTAMA : Rencana Strategis Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang Tahun 2025-2029 menjadi sebagaimana tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari ketetapan ini.
- KEDUA : Ketetapan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
Pada Tanggal 5 Desember 2024,
Direktur

Guntur Prabowo



BAB I

PENDAHULUAN

Mendapatkan pendidikan yang bermutu dan merata merupakan amanat Undang-undang yang wajib diwujudkan oleh pemerintah. Amanat ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Tujuan pendidikan nasional yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan kemajuan bangsa. Pendidikan harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Sistem pendidikan yang diselenggarakan harus terbuka dan multimakna, memungkinkan fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan agar pemerintah mengalokasikan paling sedikit 20% dari anggaran nasional untuk penyelenggaraan pendidikan.

Pelaku utama perikanan seringkali menjadi kelompok masyarakat yang “termarginalkan”, terutama dalam hal akses pendidikan. Pelaku utama perikanan meliputi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, dan pemasar hasil perikanan, serta masyarakat yang melakukan usaha di bidang kelautan dan perikanan beserta keluarga intinya. Mereka berperan penting dalam rantai produksi perikanan, mulai dari penangkapan atau budidaya hingga pengolahan dan pemasaran. Keterbatasan akses anak-anak pelaku utama terhadap pendidikan tinggi yang berkualitas umumnya disebabkan oleh keterbatasan kemampuan ekonomi orang tua mereka yang memiliki penghasilan yang rendah dan umumnya memiliki anak yang banyak. Kesadaran akan pentingnya pendidikan dalam meningkatkan taraf hidup mereka juga seringkali susah dibangkitkan karena pemenuhan kebutuhan ekonomi harian masih menjadi fokus dan tujuan utama kehidupannya. Anak-anak pelaku utama umumnya dituntut oleh orang tuanya untuk segera bekerja setelah mereka lulus pendidikan menengah -yang notabene saat ini masih dibiayai oleh pemerintah-, bahkan tidak sedikit yang tidak lulus sekolah dasar atau pendidikan menengah pertama. Sedikitnya jumlah anak-anak pelaku utama yang mengakses pendidikan tinggi menyebabkan keluarganya tetap berada di dalam garis kemiskinan. Oleh karenanya pemerintah perlu hadir dan bercampur tangan agar mata rantai kemiskinan ini dapat diputus secara bertahap.

Selama dua dekade terakhir, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah berupaya memberikan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak pelaku utama (APU) kelautan dan perikanan melalui program pendidikan bersubsidi. Hingga tahun 2025, sebanyak 10 politeknik kelautan dan perikanan dan 1 akademi komunitas telah didirikan di seluruh nusantara untuk mewujudkan salah satu misinya yaitu “Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan. Sejak tahun akademik 2023/2024 BPPSDMKP–KKP telah menerapkan kebijakan terpusat berupa penerimaan peserta didik yang 100% berasal dari anak pelaku utama perikanan dengan biaya Pendidikan yang disubsidi hingga 100%. Upaya ini secara signifikan mulai meningkatkan animo masyarakat pelaku utama

perikanan untuk menyekolahkan putra-putrinya hingga perguruan tinggi, yang dibuktikan dengan jumlah pendaftar pada politeknik kelautan perikanan di bawah KKP yang meningkat hingga tahun 2025.

Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang sebagai salah satu satuan pendidikan tinggi di bawah KKP yang berdiri sejak tahun 2016 telah memberikan peranan yang nyata dalam memberikan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik yang sebagian besarnya merupakan anak pelaku utama perikanan. Melalui pendidikan berbasis kurikulum industri dan sistem perkuliahan 1-1-3 dimana peserta didik menjalani 1 bulan kuliah teori, 1 bulan praktikum dan 3 bulan praktik di industri pada semester 3 hingga 5, menciptakan lulusan yang kompeten yang siap bekerja di industri kelautan dan perikanan sesuai bidang pilihannya. Para lulusan, selain mendapatkan ijazah, juga dibekali dengan 6 (enam) sertifikat kompetensi sesuai dengan bidangnya sehingga benar-benar siap bekerja. Angka serapan lulusan yang selalu di atas 90% setiap tahun dengan waktu tunggu bekerja yang kurang dari 6 bulan membuktikan bahwa alumni Politeknik KP Karawang memang kompeten dan dibutuhkan oleh industri. Sejak tahun 2025, Politeknik KP Karawang telah bekerjasama dengan beberapa lembaga pelatihan dan penyalur tenaga kerja asing, sehingga saat ini lulusannya telah tersebar di beberapa negara diantaranya negara Amerika Latin, Suriname, Taiwan, Tiongkok, Korea dan Jepang sebagai perwira kapal penangkap ikan dan tenaga terampil pada industri budidaya dan pengolahan ikan. Kedepannya, keterserapan lulusan dalam industri kelautan dan perikanan akan semakin ditingkatkan, terutama sebagai tenaga kerja di luar negeri yang memiliki gaji yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan dalam negeri. Dengan demikian tujuan peningkatan ekonomi dari keluarga lulusan dapat lebih cepat tercapai.

Penyelenggaraan tridharma penelitian dan pengabdian masyarakat telah dilaksanakan dengan baik dan akan terus ditingkatkan kualitas nya untuk menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Para pendidik juga telah menghasilkan banyak karya ilmiah yang dipublikasikan baik di jurnal nasional maupun internasional bereputasi dan paten. kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan secara terstruktur dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat binaan yang ada di pesisir utara Kabupaten Karawang. Dalam 5 tahun kedepan, penelitian terapan berdampak yang dapat menghasilkan paten atau hak kekayaan intelektual di bawahnya akan menjadi prioritas sehingga dapat mendukung peningkatan kelembagaan. Kegiatan pengabdian masyarakat juga akan diperluas jangkauannya, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya KKP yang akan merevitalisasi tambak di di pesisir utara Jawa mulai dari Provinsi Jawa Barat hingga Jawa Timur.

Sumber daya manusia berkualitas baik dosen, karyawan, maupun peserta didik membutuhkan interaksi objektif dalam wahana akademik yang kondusif, nyaman dan damai. Terkait dengan hal ini, Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang berkewajiban secara khusus, menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidangnya, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, dan mampu berperan dalam kehidupannya. Disamping itu, nuansa interaksi sosial dalam kampus secara tidak langsung menjadi laboratorium nyata dalam membangun kepribadian untuk mempersiapkan diri di dunia kerja. Upaya

membangun sumber daya manusia, dosen dan karyawan berkualitas diarahkan dalam kerangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya. Pada kurun waktu tahun 2020 – 2025 Politeknik KP Karawang secara ekstrim, berbeda dengan politeknik KKP lainnya- telah mengutus sebanyak 15 orang (sekitar 40%) tenaga dosennya untuk mengikuti program tugas belajar taraf strata tiga (S3), sehingga diharapkan pada tahun 2027 sebanyak 80 persen dosen telah bergelar doktor.

Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025 – 2029 ini disusun sebagai turunan dari Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik KP Karawang tahun 2025 – 2045 yang telah disusun sebelumnya. Renstra ini akan menjadi acuan dalam pengembangan Politeknik KP Karawang selama 5 tahun mendatang. Target-target yang tercantum di dalamnya menjadi indikator kinerja organisasi yang akan secara bersama-sama diwujudkan sesuai dengan linimasa yang telah ditetapkan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi

1. Visi Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang

Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi yang menyiapkan peserta didiknya untuk bekerja pada pekerjaan dengan keahlian terapan bidang kelautan dan perikanan. Lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi sesuai jenjang kualifikasi diploma III sebagaimana yang saat ini sedang berjalan dan diploma IV jika nanti penambahan program studi strata DIV berhasil didirikan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang wajib menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Perbaikan berkelanjutan menjadi kewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama dari segi aspek: kurikulum, proses belajar mengajar, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, tata kelola, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mesti direncanakan dengan baik supaya menghasilkan kinerja organisasi yang optimal. Visi Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang periode 2025-2029 adalah:

“Menghasilkan Lulusan Yang Kompeten, Berkarakter dan Berdaya Saing Global”

Visi ini mendukung Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu: “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

Visi Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang menggambarkan komitmen Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang dalam mengembangkan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang kompeten yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap bidang kerja yang akan digelutinya serta mampu meningkatkan kemampuan dan kariernya seiring bertambahnya pengalaman kerja. Lulusan Politeknik KP Karawang juga diharapkan memiliki karakter yang berbeda dengan lulusan perguruan tinggi pada umumnya. Disiplin, beretos kerja, jujur, empatik dan berwawasan pancasila menjadi keunggulan tersendiri dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Lulusan juga sangat diharapkan untuk bisa bersaing secara global yang dibuktikan dengan keterserapan dalam dunia industri yang di dalamnya terdapat karyawan dari berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, maupun industri di luar negeri yang membutuhkan keahlian khusus berupa penangkapan ikan, budidaya ikan, pengolahan ikan maupun teknik kelautan. Selanjutnya, sebagai perguruan tinggi vokasi yang telah berdiri selama 8 tahun, diharapkan Politeknik KP Karawang dapat masuk kedalam deretan perguruan tinggi vokasi terbaik di tingkat nasional maupun internasional. Penyelenggaraan pendidikan di Politeknik KP Karawang harus senantiasa sesuai dengan kepribadian Indonesia yang berazaskan Pancasila, kebhinekaan,

dan semangat gotong royong dalam upaya menyokong pencapaian kemandirian Indonesia. Kemandirian ini akan dicapai dengan mengembangkan inovasi- inovasi baru baik dibidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan tata kelola organisasinya.

2. Misi Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang

Sebagai langkah konkrit mendukung pencapaian Misi KKP dalam “Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan” Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang mempunyai misi:

- 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasional kelautan dan perikanan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan industri;
- 2) Meningkatkan kompetensi dan daya saing anak pelaku utama perikanan melalui pendidikan dengan beasiswa penuh;
- 3) Mengembangkan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat yang berfokus pada pengembangan industri kelautan dan perikanan;
- 4) Meningkatkan kerjasama dengan industri nasional dan internasional untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan dan penelitian serta serapan lulusan; dan
- 5) Menumbuhkan karakter dan kepribadian yang berdasarkan Pancasila.

B. Tujuan

Tujuan Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang:

- a. Mengembangkan sistem pendidikan vokasi yang berkualitas dan selaras dengan kebutuhan industri kelautan dan perikanan;
- b. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai bidangnya dan memiliki daya saing global melalui pembekalan bahasa asing sesuai dengan kebutuhan negara tujuan kerja;
- c. Menghasilkan penelitian terapan yang sesuai dengan kebutuhan industri serta melakukan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan masyarakat kelautan dan perikanan;
- d. Membangun kerjasama yang luas dalam rangka peningkatan serapan lulusan dan perbaikan kualitas sarana prasarana pendidikan; dan
- e. Mengembangkan pendidikan karakter melalui tata kelola kehidupan kampus yang humanis, disiplin dan kekeluargaan.

C. Tata Nilai

Pelaksanaan misi dan pencapaian visi memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang dalam menjalankan tugas membangun pendidikan, penelitian, pengabdian kepada msyarakat dan tata kelola organisasi. Tata nilai yang perlu diinternalisasi oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang dalah sebagai berikut:

1. Integritas

Pada nilai integritas terkandung makna keselarasan antara pikiran,

perkataan, dan perbuatan. Sesuai dengan nilai integritas, sivitas akademika Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang diharapkan konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan dan mengemban kepercayaan. Adapun indikator yang mencerminkan nilai integritas adalah:

- a. Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam tindakan;
- b. Jujur dalam segala tindakan;
- c. Menghindari benturan kepentingan;
- d. Berpikiran positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- e. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- g. Tidak melanggar sumpah dan janji pegawai/jabatan;
- h. Tidak melakukan perbuatan rekayasa atau manipulasi; dan
- i. Tidak menerima pemberian (gratifikasi) dalam bentuk apapun di luar ketentuan.

2. Kreatif dan Inovatif

Nilai kreatif dan inovatif bermakna memiliki daya cipta, kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Hal baru tersebut dapat berupa gagasan, metode, atau alat. Indikator dari nilai kreatif dan inovatif adalah:

- a. Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru;
- b. Selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan;
- c. Bersikap terbuka dalam menerima ide-ide baru yang konstruktif;
- d. Berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah;
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan efisien;
- f. Tidak merasa cepat puas dengan hasil yang dicapai;
- g. Tidak bersikap tertutup terhadap ide-ide pengembangan; dan
- h. Tidak monoton.

3. Inisiatif

Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan. Pegawai Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang sewajarnya melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan, dan menciptakan peluang baru atau menghindari timbulnya masalah. Indikator dari nilai inisiatif adalah:

- a. Responsif melayani kebutuhan pemangku kepentingan;
- b. Bersikap proaktif terhadap kebutuhan organisasi;

- c. Memiliki dorongan untuk mengidentifikasi masalah atau peluang dan mampu mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah;
- d. Tidak hanya mengerjakan tugas yang diminta oleh atasan; dan
- e. Tidak sekedar mencari suara terbanyak, berlindung dari kegagalan, berargumentasi bahwa apa yang Anda lakukan telah disetujui oleh semua anggota tim.

4. Pembelajar

Pada nilai pembelajar terkandung ikhtiar untuk selalu berusaha mengembangkan kompetensi dan profesionalisme. Pegawai Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang harus berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman, serta mampu mengambil hikmah dan pelajaran atas setiap kejadian. Indikator yang menunjukkan nilai pembelajar adalah:

- a. Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman;
- b. Mengambil hikmah dari setiap kesalahan dan menjadikan sebagai pelajaran;
- c. Berbagi pengetahuan/pengalaman dengan rekan kerja;
- d. Memanfaatkan waktu dengan baik;
- e. Suka mempelajari hal yang baru; dan
- f. Rajin belajar/bertanya/berdiskusi.

5. Menjunjung Meritokrasi

Nilai menjunjung meritokrasi berarti menjunjung tinggi keadilan dalam pemberian penghargaan bagi karyawan yang kompeten. Pegawai Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang perlu memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya. Indikator yang mencerminkan nilai ini adalah:

- a. Berkompetisi secara profesional;
- b. Memberikan kesempatan yang setara dalam mengembangkan kompetensi pegawai;
- c. Memberikan penghargaan dan hukuman secara proporsional sesuai kinerja;
- d. Tidak sewenang-wenang;
- e. Tidak mementingkan diri sendiri;
- f. Menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya; dan
- g. Mendapatkan promosi bukan karena kedekatan/primordialisme.

6. Terlibat Aktif

Nilai terlibat aktif bermakna senantiasa berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Pegawai Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang semestinya suka berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan, agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya. Nilai terlibat aktif terlihat dari indikator:

- a. Terlibat langsung dalam setiap kegiatan untuk mendukung visi dan misi kementerian;
- b. Memberikan dukungan kepada rekan kerja;
- c. Peduli dengan aktivitas lingkungan sekitar (tidak apatis); dan

d. Tidak bersifat pasif, sekedar menunggu perintah.

7. Tanpa Pamrih

Nilai tanpa pamrih memiliki arti bekerja dengan tulus ikhlas dan penuh dedikasi. Pegawai Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, yang memiliki nilai tanpa pamrih, tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi. Sebaliknya pegawai Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang memberikan inspirasi, dorongan, dan semangat bagi pihak lain untuk suka berusaha menghasilkan karya terbaiknya sesuai dengan tujuan bersama. Indikator nilai tanpa pamrih adalah:

- a. Penuh komitmen dalam melaksanakan pekerjaan;
- b. Rela membantu pekerjaan rekan kerja lainnya;
- c. Menunjukkan perilaku 4S (senyum, sapa, sopan, dan santun);
- d. Tidak melakukan pekerjaan dengan terpaksa; dan
- e. Tidak berburuk sangka kepada rekan kerja.

Peningkatan internalisasi ketujuh nilai di atas diantaranya pegawai Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang semakin dirasakan urgensinya untuk memastikan pembangunan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan tata kelola sesuai dengan Renstra Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang tahun 2025-2029 didukung oleh kinerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang yang prima.

D. Tujuan Strategis

Dalam upaya merealisasikan visi dan misi Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang dirumuskan tujuan strategis dan indikator kinerja tujuan tahun 2025- 2029 yang menggambarkan ukuran-ukuran dapat terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan strategis Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang tahun 2025- 2029 yaitu:

1. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan taruna.
2. Penguatan sistem tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Setiap tujuan strategis tersebut perlu diukur kinerjanya melalui indikator kinerja tujuan strategis Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang tahun 2025-2029 yaitu:

1. Tujuan Strategis 1: Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan taruna.

Indikator Kinerja Tujuan Strategis 1:

- a. Persentase serapan lulusan di dunia kerja atau berwirausaha.
- b. Persentase dosen dan tenaga kependidikan bersertifikat kompetensi.
- c. Jumlah hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terpublikasi pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi per jumlah dosen.

2. Tujuan Strategis 2: Penguatan sistem tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Indikator Kinerja Tujuan Strategis 2:

- a. Predikat SAKIP Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang.
- b. Indikator Kinerja Anggaran Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang.

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Tujuan	Target 2025
1. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan taruna	1. Persentase serapan lulusan di dunia kerja atau berwirausaha	80 %
	2. Persentase dosen dan tenaga kependidikan bersertifikat kompetensi	75 %
	3. Jumlah hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terpublikasi pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi	0,10 (hasil/jumlah dosen)
2. Penguatan sistem tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	1. Predikat SAKIP	BB
	2. Indikator kinerja anggaran	93

E. Sasaran Strategis

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis penyelenggaraan pendidikan vokasi Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang yang telah dirumuskan diperlukan sejumlah sasaran strategis yang akan dicapai hingga tahun 2029.

1. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan pertama – Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan taruna adalah meningkatnya kualitas dan daya saing lulusan, serta kerjasama dengan industri dan akreditasi internasional; meningkatnya kualitas kurikulum dan metode pembelajaran, serta kualitas dosen dan tenaga kependidikan; Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian terapan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang tepat sasaran dan berdaya guna bagi masyarakat dan dunia industri.
2. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kedua — Penguatan sistem tata kelola Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah Meningkatkan tata kelola Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Dalam rangka merealisasikan sasaran strategis yang telah dirumuskan di atas perlu diukur kinerjanya melalui indikator kinerja sasaran strategis dan ditentukan targetnya sampai tahun akhir periode renstra. Indikator kinerja mengacu kepada kebijakan pemerintah yaitu sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Nomor tentang Indikator Kinerja Utama Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 yang disebut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator kinerja sasaran strategis Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang tahun 2025-2029 adalah:

1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas dan daya saing lulusan, serta kerjasama dengan industri dan akreditasi internasional. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1:
 - a. Persentase lulusan D4/D3 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi atau berwirausaha.
 - b. Persentase lulusan D4/D3 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.
 - c. Persentase program studi D4/D3 yang melaksanakan kerjasama dengan mitra DUDI.
 - d. Persentase program studi D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.
2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kualitas kurikulum dan metode pembelajaran, serta kualitas dosen dan tenaga kependidikan. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2:
 - a. Persentase mata kuliah D4/D3 menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-base project*) sebagai bagian bobot evaluasi.
 - b. Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain (QS100) berdasarkan bidang ilmu (QS100 *by subject*), bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau membina taruna yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima).
 - c. Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.
3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian terapan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang tepat sasaran dan berdaya guna bagi masyarakat dan dunia industri. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3: Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat.
4. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya tata kelola Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4:
 - a. Predikat SAKIP.
 - b. Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L.

F. Matrik Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

Hubungan antara Misi Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang dengan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja dapat dirumuskan seperti matrik kinerja di bawah ini:

Misi Politeknik KP Karawang	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran
1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas	1. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan taruna	1. Persentase serapan lulusan di dunia kerja atau berwirausaha	1. Meningkatnya kualitas dan daya saing lulusan	1. Persentase lulusan D3 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi atau berwirausaha
				2. Persentase taruna D3 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) SKS di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional
		2. Persentase dosen dan tenaga kependidikan bersertifikat kompetensi	2. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan	3. Persentase dosen Yang berkegiatan tridharma di kampus lain (QS100) berdasarkan

Misi Politeknik KP Karawang	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran
				bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia insutri atau membina taruna yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir
				4. Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri atau dunia kerja.

Misi Politeknik KP Karawang	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran
2. Menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan		3. Persentase kurikulum disusun bersama industri	3. Meningkatnya kualitas kurikulum dan metode pembelajaran	5. Persentase mata kuliah D3 menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-base project</i>) sebagai bagian bobot evaluasi
				6. Persentase program studi D3 yang melaksanakan kerjasama dengan mitra DUDI
		4. Persentase program studi yang menjalin kerjasama dengan mitra	4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kerjasama	7. Persentase program studi D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah

Misi Politeknik KP Karawang	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran
3. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada teknologi terapan		5. Jumlah hasil penelitian terpublikasi pada jurnal nasional terakreditasi per jumlah dosen	5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian terapan yang tepat sasaran dan berdaya guna bagi masyarakat dan dunia industri	8. Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat
4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada teknologi tepat guna		6. Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat terpublikasi pada jurnal nasional terakreditasi per jumlah dosen	6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat terapan yang tepat sasaran dan berdaya guna bagi masyarakat dan dunia industri	

Misi Politeknik KP Karawang	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran
5. Mengembangkan sistem manajemen yang andal untuk tata kelola yang transparan dan terpercaya	2. Penguatan sistem tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	7. Restrukturisasi OTK dan Statuta baru	7. Meningkatnya tata kelola Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	9. Predikat SAKIP
				10. Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025- 2029 memberikan penjelasan lebih lanjut tentang lima arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita, termasuk diantaranya arahan tentang pembangunan SDM “Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global”. Peran Kemendikbud dalam agenda pembangunan RPJMN 2025-2029 bidang pendidikan dan kebudayaan dalam meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing yang tertuang dalam Renstra Kemendikbud 2025-2029 menetapkan arah kebijakan meningkatkan produktivitas dan daya saing dengan strategi: 1) Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri dan 2) Penguatan pendidikan tinggi berkualitas.

Arah kebijakan dan strategi Kemendikbud 2025-2029 dalam rangka pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian tujuan Kemendikbud ditetapkan melalui kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM). Kebijakan ini bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Secara lebih detail kebijakan MBKM mendorong partisipasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan mulai dari keluarga, guru, lembaga pendidikan, dunia usaha/dunia industri (DUDI), dan masyarakat.

Implementasi dari kebijakan MBKM secara umum terdiri empat butir kebijakan yaitu:

1. Pembukaan Program Studi Baru Kebijakan ini diatur dalam:
 - a. Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
 - b. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
2. Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Kebijakan ini diatur dalam: Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
3. Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Kebijakan ini diatur dalam:
 - a. Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
 - b. Permendikbud No. 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Taruna Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.
4. Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi Kebijakan ini diatur dalam Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Renstra Kemendikbud 2025-2029 pada matriks kinerja dan pendanaan telah menetapkan target kinerja

kegiatan untuk sasaran kegiatan terkait kebijakan MBKM sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1. Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka mewujudkan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk Revolusi Industri 4.0 yang berkualitas dan diakui industri:

1. Membuka ruang kerja sama yang erat dengan DUDI, dimana DUDI dapat langsung terlibat dalam menginformasikan kebutuhan pasar tenaga kerja dan memastikan kualitas program pendidikan dan pelatihan vokasi dimutakhirkan sesuai dengan standar industri.
2. Membentuk forum kerja sama DUDI dengan lembaga pendidikan yang relevan agar setiap program pendidikan vokasi baik di SMK, pendidikan tinggi vokasi, maupun kursus dan pelatihan menghasilkan kompetensi lulusan yang standarnya diakui oleh industri.
3. Memfasilitasi kerja sama yang mumpuni dengan DUDI dalam setiap pembukaan atau pengembangan prodi di pendidikan tinggi vokasi.
4. Meningkatkan kualitas pembelajaran pada pendidikan dan pelatihan vokasi dengan metode *problem-based learning* agar peserta didik dapat mengembangkan *technical skills* dan *soft skills* sesuai dengan standar DUDI.
5. Mendorong pengembangan produk dan atau jasa melalui riset terapan dan inovasi dengan kerja sama industri dan masyarakat.
6. Peningkatan kapasitas *technical skills*, *soft skills*, dan *pedagogical skills* sumber daya manusia di pendidikan dan pelatihan vokasi (guru/instruktur/dosen/pelatih) agar sesuai dengan standar DUDI.
7. Mendorong kapasitas kepemimpinan dan kemampuan manajemen usaha pimpinan (kepala sekolah, direktur) dalam mengembangkan institusi pendidikan dan pelatihan vokasi.
8. Memberikan kesempatan praktisi industri/profesional untuk mengajar di pendidikan dan pelatihan vokasi.
9. Memberikan kesempatan bagi setiap peserta didik untuk melakukan praktik kerja industri dan/atau *project work* dengan DUDI.
10. Memberikan kesempatan profesional atau pekerja untuk kembali ke institusi pendidikan vokasi dengan mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Direktorat Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi) mendorong terwujudnya Link and Match atau "Pernikahan" antara pendidikan vokasi dan dunia industri atau dunia kerja.

Berdasar uraian tersebut di atas maka Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi menyesuaikan kebijakannya dengan mengacu kepada kebijakan dan program Ditjen Diksi yang terdiri dari:

1. Kurikulum disusun bersama industri (materi training dan sertifikasi di industri masuk resmi kedalam kurikulum di kampus).
2. Dosen tamu/praktisi dari industri rutin mengajar di kampus.
3. Program magang yang terstruktur dan dikelola bersama dengan baik.
4. Komitmen kuat dan resmi pihak industri menyerap lulusan.
5. Program beasiswa dan ikatan dinas bagi taruna.
6. Bridging Program: Pihak industri memperkenalkan teknologi dan proses kerja industri yang diperlukan kepada para dosen.
7. Sertifikasi kompetensi bagi lulusan diberikan oleh pendidikan tinggi bersama industri.
8. Pihak industri memberikan bantuan peralatan laboratorium kepada kampus.

9. Joint research, riset terapan dosen yang berasal dari kasus nyata di industri.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, Ditjen Diksi bersama Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang telah menetapkan indikator kinerja jangka menengah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi.
 - a. Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB.
 - b. Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93.
2. Meningkatkan Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi.
 - a. Persentase lulusan D4/D3 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi atau berwirausaha.
 - b. Persentase lulusan D4/D3 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.
3. Meningkatkan Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi.
 - a. Persentase dosen yang bertridharma di PT lain; di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau membina taruna yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima).
 - b. Persentase dosen tetap berkualifikasi S3; memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh industri/dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, dunia kerja.
 - c. Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran.
 - a. Persentase program studi D4/D3 yang melaksanakan kerjasama dengan mitra.
 - b. Persentase mata kuliah D4/D3 menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-base project) sebagai bagian bobot evaluasi.
 - c. Persentase program studi D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang

1. Strategi Umum

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan strategi umum Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang yaitu:

- a. Meningkatkan mutu pendidikan dengan cara menerapkan SPMI yang berkualitas melalui implementasi PPEPP yang berkelanjutan. Menyesuaikan berbagai kebijakan kampus dalam rangka pelaksanaan program MBKM dan mendorong terwujudnya Link and Match atau “Pernikahan” dengan berbagai DUDI yang relevan dengan berbagai bidang ilmu di program studi.

- b. Melakukan pembenahan internal dan penguatan atas sumber daya manusia, fasilitas, teknologi dan manajemen.
 - c. Mempertahankan jati diri pendidikan vokasi bidang kelautan dan perikanan dengan pengembangan berbagai bidang ilmu terkait.
- 2. Strategi Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Lulusan
 - a. Pelaksanaan pendidikan yang berorientasi kebutuhan dunia industri dan dunia usaha.
 - b. Implementasi kerjasama industri dalam pelaksanaan pendidikan menuju kompetensi yang sesuai standar industri.
 - c. Mengimplementasikan belajar diluar kampus minimal 20 sks sebagai wujud kebijakan MBKM.
 - d. Implementasi tugas akhir taruna, berbasis project-based, problem solving, atau tematik.
 - e. Kerjasama dengan berbagai DUDI dalam dan luar negeri.
 - f. Sertifikasi kompetensi lulusan sesuai dengan bidang ilmu.
 - g. Penerbitan surat keterangan pendamping ijazah.
 - h. Standarisasi lulusan D3 sesuai KKNl.
 - i. Menerapkan tata nilai dalam kegiatan pembelajaran di Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang sebagai basis pendidikan karakter.
 - j. Mengembangkan muatan dan budaya kewirausahaan dalam pembelajaran serta memfasilitasi kegiatan kewirausahaan dengan alokasi dana hibah (dana bergulir), lomba kewirausahaan, kerjasama dengan pelaku usaha, asosiasi profesi (HIPMI, PT, dan lain-lain).
 - k. Program alih jenjang untuk meningkatkan kualifikasi lulusan.
- 3. Strategi Pengembangan Program Studi
 - a. Mendorong program studi untuk melakukan kerjasama dengan industri dalam bidang pengembangan kurikulum, magang, dosen tamu dari industri.
 - b. Program studi selalu meningkatkan kinerja, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan yang akan terefleksi dari akreditasi nasional maupun internasional.
 - c. Pembukaan program studi baru baik mandiri maupun bekerjasama dengan industri.
 - d. Meningkatkan mutu input calon taruna melalui Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri (SNMPN), Seleksi Bersama Masuk Politeknik Negeri (SBMPN), dan Ujian Mandiri (UM).
- 4. Strategi Pengembangan Laboratorium Kompetensi
 - a. Menyediakan fasilitas pembelajaran *teaching factory* serta *teaching industry* di laboratorium kompetensi.
 - b. Kerjasama laboratorium dengan industri dalam update teknologi yang digunakan di industri.
 - c. Mempersiapkan akreditasi laboratorium kompetensi.

5. Strategi Pengembangan Kurikulum dan Metode Pembelajaran
 - a. Implementasi dan pengembangan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-base project*).
 - b. Pengembangan kurikulum bersama industri dan dunia usaha.
 - c. Menyediakan teknologi informasi dalam pembelajaran berbasis IT.
 - d. Pengembangan magang terstruktur berkerjasama dengan industri dan dunia usaha.
 - e. Implementasi metode belajar blended learning yaitu kuliah secara daring, sedangkan praktek dilakukan di laboratorium kompetensi.
6. Strategi Meningkatkan Kualitas Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - a. Program *retooling* dosen vokasi yang memungkinkan dosen untuk mengikuti pelatihan kompetensi yang ada di industri.
 - b. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dosen industri memungkinkan praktisi mengajar di perguruan tinggi sesuai homebase.
 - c. Menggiatkan dosen dalam pembinaan taruna agar berprestasi tingkat nasional akademik dan non akademik.
 - d. Mendorong dosen untuk melanjutkan studi S3 dalam dan luar negeri.
 - e. Menata kepakaran dan home base dosen untuk rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan baru.
 - f. Pembinaan dosen dan tenaga kependidikan muda untuk pengganti dosen dan tenaga kependidikan yang memasuki usia pensiun.
7. Strategi Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
 - a. Mensinergikan penelitian dan PkM Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang yang berorientasi pada pengembangan produk/jasa yang memberi nilai manfaat terhadap masyarakat, industri dan dunia usaha yang berdampak pada peningkatan kualitas bahan ajar dan proses pembelajaran serta publikasi ilmiah dan perolehan paten/HaKI lainnya.
 - b. Meningkatkan kerjasama penelitian terapan dengan industri dan dunia usaha.
 - c. Membuat payung penelitian yang selaras dengan kebutuhan/permasalahan industri dan dunia usaha.
 - d. Meningkatkan kemampuan dosen dalam membuat proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk berbagai skema pendanaan nasional dan internasional.
 - e. Dosen dan taruna diarahkan pada penelitian terapan dengan luaran berbasis karya/produk inovatif dan atau teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi masyarakat, industri dan dunia usaha serta mendapatkan HAKI, publikasi ilmiah, dan bahan ajar.
 - f. Program studi memiliki grand research dan peta PkM yang relevan dengan perkembangan keilmuan prodi dan selaras dengan kebutuhan masyarakat, dunia industri dan dunia usaha.
 - g. Penguatan peran Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) dalam implementasi Renstra Penelitian dan Renstra Pengabdian kepada masyarakat.

8. Strategi Meningkatkan Publikasi Hasil Penelitian Dosen dan Taruna
 - a. Memberikan insentif kepada dosen yang berhasil publikasi di Jurnal Internasional bereputasi.
 - b. Mengadakan klinik penulisan ilmiah untuk publikasi Jurnal Internasional bereputasi.
 - c. Memberikan insentif kepada tim pengelola jurnal ilmiah terakreditasi yang dikelola Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang.
 - d. Mengadakan seminar nasional dan internasional.
 - e. Mendorong dosen untuk publikasi.
 - f. Repository.

9. Strategi Meningkatkan Hasil Penelitian yang Diadopsi Industri/Masyarakat dan Mendapatkan Paten
 - a. Implementasi identifikasi masalah industri/masyarakat oleh taruna sewaktu magang dan menjadikan masalah tersebut sebagai objek penelitian dosen.
 - b. Menyelaraskan payung penelitian dengan masalah industri yang butuh pemecahannya secara ilmiah.
 - c. Mengirim jurnal dan prosiding hasil penelitian ke industri untuk dicocokkan dengan kebutuhan industri.
 - d. Memfasilitasi dan memberi insentif kepada dosen yang hasil penelitiannya didaftarkan untuk memperoleh paten/HaKI.

10. Strategi Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan
 - a. Pelaksanaan program, kegiatan dan penganggaran berbasis kinerja, dengan prinsip efektif, efisien, ekonomis dan produktif. Kinerja fokus mewujudkan outcomes (hasil).
 - b. Memiliki laporan keuangan yang terstandar meliputi laporan pokok, realisasi anggaran, posisi keuangan, aktivitas dan aliran kas; dan
 - c. Mengarahkan tata kelola pendidikan tinggi menjadi satuan kerja berbasis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKBLU).

11. Strategi Penguatan Manajemen Institusi dan SPMI
 - a. Penyelenggaraan tata kelola Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang mengacu pada OTK sesuai Permen KP Tahun ... tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, serta Statuta sesuai Permen KP Nomo tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang.
 - b. Menerapkan SPMI yang berkualitas melalui implementasi PPEPP dalam rangka mewujudkan budaya mutu di Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang.
 - c. Evaluasi dokumentasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap capaian kinerja di semua unit kerja serta terintegrasi dan mudah diakses.
 - d. Menumbuhkan budaya kerja produktif, efisien, efektif dan inovatif dengan penguatan mindset (pola pikir), attitude (sikap), behavior (perilaku), kepedulian lingkungan (kerja dan sosial), komitmen,

dedikasi dan integritas antara lain berperilaku tertib waktu, aturan, dan ukuran, serta keteladanan mulai dari unit kerja tertinggi sampai unit kerja terendah.

- e. Setiap individu pegawai memberikan kontribusi yang jelas dan terukur terhadap kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan.

12. Strategi Meningkatkan Manajemen Akademik dan Non Akademik

- a. Layanan akademik dijalankan secara terstruktur mulai dari Jurusan sebagai pelaksana akademik yang dipimpin oleh Ketua Jurusan, Program Studi sebagai kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran dipimpin oleh Koordinator Program Studi, unit layanan praktek dilaksanakan oleh laboratorium kompetensi yang dipimpin oleh Kepala Laboratorium.
- b. Direktur bersama para Wakil Direktur memerankan fungsi kepemimpinan tingkat institusi. Kepala Pusat, Ketua Jurusan dan Kepala UPT memerankan fungsi kepemimpinan di tingkat unit.
- c. Pemekaran jurusan sesuai bidang kelompok bidang ilmu.
- d. Memberikan layanan dan kemudahan operasional yang lebih cepat, murah, efisien, efektif dan produktif serta berorientasi kepada kepuasan pelanggan.
- e. Mengimplementasikan Sistem Informasi untuk layanan administrasi yang terintegrasi.
- f. Mengoptimalkan mutu layanan ketarunaan yang mencakup bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan soft skills, layanan beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan, serta layanan kesehatan;
- g. Mewajibkan taruna mengikuti kegiatan ketarunaan ekstra kurikuler, dan mendorong taruna untuk aktif mengikuti lomba-lomba di dalam dan luar negeri;
- h. Penguatan kualitas kegiatan himpunan taruna, bakti sosial masyarakat, kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku, MTQ, dan lain-lain.

13. Strategi Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana

- a. Pemakaian sarana dan prasarana secara efektif dan efisien.
- b. Menjalin kerja sama dengan industri untuk dapat menempatkan alat/mesinnya untuk keperluan praktek taruna.

14. Strategi Meningkatkan Jumlah Kerjasama Institusi

- a. Memperbaharui naskah MoU untuk dapat digunakan sebagai syarat perusahaan untuk mendapatkan Super Tax Deduction.
- b. Mendorong dosen untuk melakukan kerja sama penelitian dengan industri.
- c. Mengimplementasikan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dosen industri agar dapat mengajar di Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang sebagai dosen praktisi.

C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang mendukung dan melandasi pelaksanaan rencana pengembangan pendidikan tinggi vokasi Politeknik Kelautan

dan Perikanan Karawang tahun 2025-2029 selaras dengan kebijakan KKP sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penerimaan Taruna Baru.
7. Peraturan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Nomor 2195/PER-BPPSDM.4/2024 tentang Rencana Strategis Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029

Perlu ditetapkan berbagai kebijakan institusi dalam mengimplementasi merdeka belajar dan kampus merdeka dalam berbagai hal seperti: rumusan kurikulum, kuliah lintas prodi (maupun lintas PT), pembelajaran luar kampus, dll. Semua kebijakan institusi tersebut dalam rangka memperkuat jaminan mutu pelaksanaan pendidikan tinggi vokasi Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang.

D. Kerangka Kelembagaan

Penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang telah diatur dan terstruktur sesuai PermenKP Nomor 91 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, serta Statuta sesuai PermenKP Nomor 52 Tahun 2021 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang. Semua organ baik pengelola maupun pengawasan melaksanakan tugas sesuai tupoksi masing-masing dalam rangka penyelenggaraan akademik maupun non akademik dan bertanggung jawab kepada pimpinan Direktur selaku pimpinan organisasi.

E. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola organisasi. Kualitas tata kelola akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program pengembangan organisasi, semakin baik tata kelola maka semakin cepat pencapaian-pencapaian program. Dalam rangka memastikan pengelolaan perencanaan dan tata kelola reformasi birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan *stakeholder* yang berkepentingan. Inti perubahan dari reformasi birokrasi adalah perubahan pada mental aparatur. perubahan tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui

langkah-langkah yang ditujukan langsung kepada aparatur, tetapi juga harus ditujukan kepada seluruh sistem yang melingkup aparatur tersebut. Permasalahan birokrasi:

1. Pola pikir (*mind-set*) dan budaya kerja (*culture-set*) birokrasi belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional.
2. Sistem pengawasan internal belum mampu berperan sebagai *quality assurance* sistem monitoring, evaluasi, dan penilaian belum dibangun dengan baik.
3. Fungsi dan kewenangan antar instansi pemerintah tumpang tindih, berbenturan, terlalu besar.
4. Pelaksanaan program dan kegiatan belum sepenuhnya didasarkan atas prosedur yang baku dan terstandarisasi.
5. Praktik manajemen SDM belum optimal meningkatkan profesionalisme.
6. Tumpang tindih peraturan perundang-undangan di bidang aparatur negara, tidak sesuai dengan kondisi saat ini.
7. Kualitas pelayanan publik masih belum memenuhi harapan publik.

Tujuan reformasi birokrasi 2025-2029 adalah birokrasi Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang yang baik dan bersih. Sasaran reformasi birokrasi secara umum tahun 2025-2029 adalah

1. Birokrasi bersih dan akuntabel.
2. Birokrasi yang kapabel.
3. Pelayanan publik yang prima.

F. Koordinasi dan Tata Kelola

Implementasi Rencana Strategis Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang memerlukan sistem tata kelola yang sinergis dan terintegrasi dengan berpedoman pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Perundangan terkait. Selain itu, diperlukan penataan tugas dan tanggung jawab masing-masing Wakil Direktur dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan sasaran strategis pembangunan pendidik dan tenaga kependidikan.

Dalam menjalankan sistem tata kelola yang baik, diperlukan pola *good governance*. *Good governance* terdiri atas 7 (tujuh) karakteristik yaitu akuntabel, transparan, taat aturan, responsif, setara dan inklusif, efektif dan efisien, dan partisipatif.

Akuntabilitas merupakan kebutuhan dasar dari *good governance*. Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang sebagai pemimpin perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan, dan menjawab berbagai pertanyaan terkait konsekuensi sebuah ketetapan yang terkait dengan masyarakat khususnya pendidik dan tenaga kependidikan. Selain itu, *good governance* harus memiliki karakteristik teransparan. Masyarakat harus dapat mengikuti dan mengerti proses penetapan keputusan, sehingga masyarakat dapat melihat dengan jelas mengapa suatu keputusan dibuat serta informasi, saran, dan konsultasi apa saja yang dipertimbangkan dalam mengambil keputusan tersebut. *Good governance* juga harus taat aturan, sehingga keputusan yang diambil konsisten dengan aturan perundangan yang

relevan. Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang sebagai perguruan tinggi juga harus dapat melayani kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan secara seimbang antara berbagai kepentingan secara tepat waktu dengan sikap yang sopan, dan responsif. *Good governance* juga tercermin ketika semua pendidik dan tenaga kependidikan merasakan bahwa kepentingannya telah dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.

Good governance juga harus efektif dan efisien. Dalam menjalankan tata kelola, Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang harus mampu memanfaatkan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan waktu yang ada dengan efektif dan efisien. Setiap orang yang terkait dan/atau tertarik harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Cara ini dapat dilakukan melalui penyampaian informasi, permintaan opini, pemberian kesempatan untuk menyampaikan rekomendasi, ataupun terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan.

Pelaksanaan tata kelola berbasis *good governance* dapat menjadi ukuran akuntabilitas kinerja pelayanan perguruan tinggi yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh satuan pengawas internal.

G. Pengendalian dan Evaluasi

Tahap pengendalian dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan rencana pembelajaran sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam Renstra Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang. Ruang lingkup pengendalian mencakup realisasi pelaksanaan program pembelajaran dan identifikasi permasalahan dan kendala pembelajaran serta langkah tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang.

Sementara itu, evaluasi dimaksudkan untuk dapat mengetahui dengan pasti capaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dalam rangka perbaikan pelaksanaan rencana pembelajaran di masa yang akan datang. Fokus utama evaluasi diarahkan pada keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), dan dampak (*impact*) dari pelaksanaan rencana pembelajaran.

Proses pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang merupakan upaya bersama antar unit. Hal ini dilakukan untuk menjamin efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi proses pembelajarannya.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang dilakukan di bawah koordinasi Satuan Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawasan Internal. Pengendalian pada masing-masing unit dilakukan oleh unit kerja masing-masing yang menyelenggarakan fungsi pembelajaran dengan bekerjasama dengan satuan penjaminan mutu pada level masing-masing unit.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Tugas dan fungsi Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi antara lain:

1. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi.
2. Pelaksanaan penelitian.
3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika.
5. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi.

Penyelenggaraan semua tugas di atas bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dibawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Menjadi kewajiban seluruh unit yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan tinggi vokasi Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang untuk mensukseskan pencapaian program kerja sesuai dengan target kinerja masing- masing sasaran yang telah ditetapkan.

Ada 4 (empat) sasaran strategis Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang periode 2025-2029 yang telah ditetapkan. Sasaran strategis ini memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yang diberi target capaian kinerja per tahun sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.1

s.d Tabel 4.4. Target capaian ini menggambarkan tingkat ketercapaian hasil (output) dan dampak (outcome) dari kegiatan-kegiatan pada tiap sasaran strategis tersebut. Target capaian per tahun akan dievaluasi setiap tahun sebagai pedoman untuk memastikan tercapainya sasaran strategis pada akhir periode.

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas dan daya saing lulusan, serta kerjasama dengan industri dan akreditasi

Tabel 4.1 Indikator kinerja dan target capaian per tahun sasaran strategis 1

No.	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan 1: Peningkatan kualitas dan daya saing lulusan									
1.	IKU.1.1.01	Persentase lulusan D3 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi atau Berwirausaha	%	90	90	90	90	90	
2.	IKU.1.1.02	Persentase taruna D3 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) SKS di luar kampus atau meraih prestasi paling sedikit tingkat nasional	%	10	10	10	10	10	
3.	IKT.1.1.01	Persentase lulusan bersertifikat Kompetensi	%	100	100	100	100	100	
4.	IKT.1.1.02	Persentase taruna yang meraih prestasi akademik dan non akademik minimal tingkat nasional	%	5	5	5	10	10	
5.	IKT.1.1.03	Rata-rata IPK lulusan	Skala 4.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.2	
6.	IKT.1.1.04	Rasio lulusan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	
7.	IKT.1.1.05	Persentase waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama kurang dari 6 bulan	%	90	90	90	90	90	
8.	IKT.1.1.06	Persentase lulusan yang berwirausaha	%	5	5	10	10	10	
9.	IKT.1.1.07	Persentase lulusan bekerja di industri	%	80	80	80	80	80	
10.	IKT.1.1.08	Persentase lulusan yang melanjutkan studi	%						

Kegiatan 2: Pengembangan program studi									
1.	IKU.1.2.01	Persentase program studi D3 yang melaksanakan kerjasama dengan mitra DUDI	%						
2.	IKU.1.2.02	Persentase program studi D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	%						
3.	IKT.1.2.01	Jumlah kerjasama dengan mitra DUDI	MoU						
4.	IKT.1.2.02	Persentase program studi terakreditasi BAN-PT atau LAM dengan peringkat unggul	%						
5.	IKT.1.2.03	Jumlah program studi	Prodi						
6.	IKT.1.2.04	Rasio pelamar program studi	Desimal						
7.	IKT.1.2.05	Persentase taruna penerima beasiswa	%						
Kegiatan 3: Pengembangan laboratorium kompetensi									
1.	IKT.1.3.01	Jumlah <i>teaching factory</i> di laboratorium kompetensi	Program						
2.	IKT.1.3.02	Jumlah laboratorium terakreditasi nasional	Lab						
3.	IKT.1.3.03	Jumlah laboratorium yang berkolaborasi dengan industri/ dunia usaha	Lab						

2. Sasaran Strategis 2: Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang tepat sasaran dan berdaya guna bagi masyarakat dan dunia industri

Tabel 4.2 Indikator kinerja dan target capaian per tahun sasaran strategis 2

No.	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan 4: Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat									
1.	IKU.2.4.0 1	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat	Hasil per jumlah dosen						
2.	IKT.2.4.0 1	Jumlah keluaran penelitiandan pengabdian kepada masyarakat terpublikasi pada jurnal nasional terakreditasi per jumlah dosen	Hasil per jumlah dosen						
3.	IKT.2.4.0 2	Jumlah penelitian yang didanai	Jumlah judul per jumlah dosen						
4.	IKT.2.4.0 3	Jumlah pengabdian kepada masyarakat yang didanai	Jumlah judul per jumlah dosen						
5.	IKT.2.4.0 4	Persentase keterlibatan taruna dalam penelitian dan pengabdian dosen	%						
6.	IKT.2.4.0 5	Jumlah mitra binaan pengabdian kepada masyarakat dosen	Mitra						
Kegiatan 5: Peningkatan publikasi hasil penelitian dosen dan taruna									

1.	IKT.2.5.0 1	Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi	Artikel						
2.	IKT.2.5.0 2	Jumlah publikasi dosen bersama taruna di jurnal internasional	Artikel						
3.	IKT.2.5.0 3	Jumlah hasil penelitian yang diseminarkan di seminar nasional dan internasional	Artikel						
4.	IKT.2.5.0 4	Persentase dosen mempunyai H-index Google Scholar > 2	%						
5.	IKT.2.5.0 5	Persentase dosen yang mempunyai H-index Scopus > 2	%						
Kegiatan 6: Peningkatan hasil penelitian yang diadopsi industri/masyarakat dan mendapatkan paten/HKI									
1.	IKT.2.6.0 1	Jumlah hasil penelitian dosen yang diadopsi oleh industri/masyarakat atau memperoleh paten	Produk						
2.	IKT.2.6.0 2	Jumlah hasil penelitian dosen berupa teknologi tepat guna (TTG) atau produk	Produk						
3.	IKT.2.6.0 3	Jumlah karya dosen dan taruna berupa buku atau <i>book-chapter</i> berISBN	Produk						

3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kualitas kurikulum dan metode pembelajaran serta kualitas dosen dan tenaga kependidikan Tabel 4.3 Indikator kinerja dan target capaian per tahun sasaran strategis 3

No.	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan 4: Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat									

1.	IKU.3.7.0 1	Persentase mata kuliah D3 menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-base project</i>) sebagai bagian bobot evaluasi	%	35	35	35	35	35	
2.	IKT.3.7.0 1	Persentase kurikulum disusun bersama industri	%	25	25	25	50	50	
3.	IKT.3.7.0 2	Jumlah program magang terstruktur yang dikelola bersama mitra DUDI	Program	5	5	10	10	10	
4.	IKT.3.7.0 3	Persentase taruna yang terlibat dalam kegiatan ketarunaan	%	65	65	67	67	69	
Kegiatan 8: Peningkatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan									
1.	IKU.3.8.0 1	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain (QS100) berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau membina taruna yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	%	15	15	15	15	15	
2.	IKU.3.8.0 2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja	%	20	20	20	20	20	

3.	IKT.3.8.0 1	Persentase dosen dan tenaga kependidikan bersertifikat kompetensi	%	15	16	17	18	19	
4.	IKT.3.8.0 2	Jumlah dosen berkualifikasi S3	Dosen	-	-	-	10	10	
5.	IKT.3.8.0 3	Persentase dosen bersertifikat pendidik	%	26	27	28	29	30	
6.	IKT.3.8.0 4	Persentase dosen berjabatan akademik lektor	%	11	12	13	14	15	
7.	IKT.3.8.0 5	Jumlah dosen dari praktisi industri	Orang	4	4	6	6	8	
8.	IKT.3.8.0 6	Persentase tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi atau berkualifikasi S1	%	31	32	33	34	35	

4. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya tata kelola Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Tabel 4.4 Indikator kinerja dan target capaian per tahun sasaran strategis 4

No.	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan 9: Peningkatan sistem pengelolaan keuangan									
1.	IKU.4.9.01	Predikat SAKIP	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	
2.	IKU.4.9.02	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	93	93	94	94	95	
Kegiatan 10: Penguatan manajemen institusi dan SPMI									
1.	IKT.4.10.0 1	Peringkat akreditasi institusi oleh BAN-PT	Peringkat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
2.	IKT.4.10.0 2	Rangking perguruan tinggi secara nasional	Rangking	20	19	18	17	16	
3.	IKT.4.10.0 3	Restrukturisasi OTK dan Statuta	Dokumen	-	-	2	-	-	
Kegiatan 11: Peningkatan manajemen akademik dan non akademik									

1.	IKT.4.11.0 1	Kapasitas <i>bandwidth</i> internet yang tersedia	Mbps	100	100	100	100	100	
2.	IKT.4.11.0 2	Indeks kepuasan layanan akademik dan non akademik	Skala 5	3.0	3.25	3.5	3.75	4.0	
3.	IKT.4.11.0 3	Indeks penguatan karakter dan budaya kerja	Skala 5	3.0	3.25	3.5	3.75	4.0	
4.	IKT.4.11.0 4	Indeks implementasi reformasi birokrasi	Skala 5	3.0	3.25	3.5	3.75	4.0	
5.	IKT.4.11.0 5	Indeks penguatan manajemen jurusan dan unit	Skala 5	3.0	3.25	3.5	3.75	4.0	
Kegiatan 12: Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana									
1.	IKT.4.12.0 1	Rasio ketersediaan ruangan dengan kebutuhan kelas pembelajaran	Desimal	0.8	0.8	1.2	1.2	1.2	
2.	IKT.4.12.0 2	Rasio alat bantu pengajaran dalam ruangan	Desimal	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	
3.	IKT.4.12.0 3	Persentase peralatan laboratorium yang mendukung <i>teaching factory/teaching industry</i>	%	33	35	37	39	41	
Kegiatan 13: Peningkatan jumlah kerjasama industri									
1.	IKT.4.13.0 1	Jumlah kerjasama (MoU/MoA) nasional dan internasional tingkat institusional	MoU	15	17	19	21	23	
2.	IKT.4.13.0 2	Jumlah industri/dunia usaha yang berkomitmen menyerap lulusan	Perusahaan	1	1	1	2	2	
3.	IKT.4.13.0 3	Jumlah industri/dunia usaha yang memberikan beasiswa	Perusahaan	1	1	1	1	1	

4.	IKT.4.13.0 4	Persentase sertifikasi kompetensi yang diberikan kolaborasi dengan industri	%	5	6	7	8	9	
----	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	--

B. Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, setiap tahunnya Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang mendapatkan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang terdiri dari anggaran Rupiah Murni (RM), Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), dan anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Secara garis besar anggaran tersebut terdiri dari dua fungsi anggaran, yaitu fungsi pendidikan dan fungsi layanan umum termasuk pembangunan fasilitas gedung kantor dan kuliah. Mulai tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang mendapatkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dimasukkan dalam Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang.

Kebutuhan anggaran pada tahun 2025-2029 masih akan difokuskan pada pelaksanaan pembelajaran, kebutuhan operasional sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan perkuliahan, praktikum, pengembangan IPTEK dan penyelenggaraan institusi pendidikan tinggi vokasi. Untuk mendukung kegiatan tersebut diperlukan alokasi dana mulai dari tahun 2025 hingga tahun 2029. Selain dari dana APBN, Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang akan berusaha keras untuk mendapatkan pendanaan yang berasal dari pembiayaan SBSN ataupun program- program hibah lainnya. Disisi lain, Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang juga akan berupaya agar pihak industri dan lembaga mitra Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang dapat memberikan dukungan pendanaan untuk kegiatan pengembangan tata kelola, pembelajaran, penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi melalui skema kerjasama kemitraan.

Tabel 4.5. Kerangka Pendanaan Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang Tahun 2025 – 2029 Berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	Tahun				
	2026	2027	2028	2029	2029
Belanja Pegawai					
Belanja Barang					
Belanja Modal					
Total					

Tabel 4.6. Kerangka Pendanaan Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang Tahun 2025 –2029 Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Tahun				
	2026	2027	2028	2029	2029
Rupiah Murni					
BOPTN					
PNBP					
SBSN					
Total					

BAB V

PENUTUP

Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang menetapkan visinya untuk menjadi salah satu politeknik terbaik pada tahun 2029. Renstra Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang disusun agar program pengembangannya sejalan dengan pencapaian visi-misi tersebut dengan fokus kepada pencapaian sasaran mutu pendidikan sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan oleh industri. Dengan demikian diharapkan institusi ini bisa menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap pakai di industri. Hal tersebut merupakan kontribusi langsung Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang dalam peran serta ikut mewujudkan tujuan negara mencapai masyarakat adil dan makmur melalui sektor pendidikan dan penyediaan tenaga profesional di tanah air.

Renstra ini juga menjaga keselarasan program-program Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang agar senantiasa relevan dengan mandat dan tugas pokoknya melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Pelaksanaan program-program pendidikan dan pengajaran diharapkan menghasilkan keluaran dalam bentuk peningkatan kualitas lulusan pada aspek pengetahuan, intelektual, keterampilan, sikap, kemandirian dan kewirausahaan. Program-program penelitian mengarah kepada kegiatan riset terapan dan inovasi yang melibatkan dosen, tenaga kependidikan (pranata laboratorium pendidikan) dan taruna, sehingga menghasilkan dosen dan taruna yang senantiasa menjaga kekinian ilmunya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebutuhan industri. Program pengabdian kepada masyarakat diarahkan kepada implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi oleh dosen dan taruna sehingga bisa berkontribusi secara langsung di masyarakat dalam bidang pendidikan maupun karya-karya teknologi yang bermanfaat.

Renstra akan menentukan arah program kegiatan dalam membangun kapabilitas institusi melalui peningkatan sumber daya yang berkelanjutan serta penguatan tata kelola yang mempertahankan kebutuhan pemangku kepentingan. Pelaksanaan program penguatan tata kelola diharapkan akan meningkatkan kapabilitas institusi dalam menjalankan mandat dan fungsinya sehingga menjadi lebih efektif, efisien dan akuntabel serta mampu menjalankan lingkup otonomi yang menjadi mandatnya dengan kinerja yang memuaskan semua pemangku kepentingan.

Renstra ini juga mempersiapkan kapabilitas institusi dan sumber dayanya sehingga mampu mengikuti gerak globalisasi melalui kerjasama. Bentuk kerjasamanya yang dicanangkan adalah dalam bentuk penelitian bersama, pertukaran dosen dan taruna serta menjalankan proses belajar mengajar bersama dengan perguruan tinggi dan industri.

Rancangan Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025-2029 Politeknik KP Karawang

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2025-2029				
				2025	2026	2027	2028	2029
Pendidikan Kelautan dan Perikanan	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1	Peserta pendidikan kelautan dan perikanan Politeknik KP Karawang yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	81	78	76	76	76
		2	Jumlah lulusan Politeknik KP Karawang (Orang)	95	92	89	89	89
		3	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Politeknik KP Karawang yang kompeten(Orang)	277	274	274	274	274
		4	Nilai PNBSP satker Politeknik KP Karawang (Rp.Miliar)	0.239	0.239	0.239	0.239	0.239
		5	Kerjasama Politeknik KP Karawang yang disepakati (Kesepakatan)	3	3	3	3	3
		6	Persentase lulusan Politeknik KP Karawang yang bersertifikat kompetensi (%)	100	100	100	100	100
		7	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di Politeknik KP Karawang (%)	100	100	100	100	100
	Tersedianya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pendidikan tinggi kelautan dan perikanan	8	Kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik KP Karawang (Paket)	4	4	4	4	4
		9	Pengabdian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik KP Karawang (Kelompok)	1	4	4	4	4

	Terselenggaranya tata kelola pendidikan kelautan dan perikanan	10	Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi pada Politeknik KP Karawang (Lembaga)	1	1	1	1	1
		11	Tenaga pendidik kelautan dan perikanan Politeknik Kp Karawang yang tersertifikasi (Orang)	35	35	35	35	35
	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan kelautan dan perikanan yang terstandar	12	Peralatan dan mesin serta sarana teknologi informasi dan komunikasi bidang Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan Kapasitasnya pada Politeknik KP Karawang (Paket)	1	2	2	2	2
		13	Prasarana Pendidikan menengah dan tinggi kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya pada Politeknik KP Karawang (Paket)	1	1	1	1	1
	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel bidang penyuluhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	14	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik KP Karawang (%)	85	85	85	85	85
		15	Penilaian mandiri SAKIP Politeknik KP Karawang (Nilai)	81	82	83	84	85
		16	Indeks Profesionalitas ASN Politeknik KP Karawang (Indeks)	84	85	86	87	88
		17	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik KP Karaang (%)	80	80	80	80	80
		18	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Politeknik KP Karawang (%)	80	80	80	80	80
		19	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik KP Karawang (Nilai)	92	92	92	92	92

		20	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik KP Karawang (Nilai)	71.5	71.5	71.5	71.5	71.5
		21	Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lingkup Politeknik KP Karawang (%)	100	100	100	100	100

Karawang, 15 Mei 2025



DH: Guntun Prabowo



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 91 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025;
- Mengingat :
 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 4. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
 5. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja KKP tahun 2025 yang terdiri atas:
- a. arah kebijakan, sasaran strategis, program (sasaran program dan indikator sasaran program), dan kegiatan (sasaran kegiatan dan indikator sasaran kegiatan), serta dukungan terhadap prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. matriks Renja KKP Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - c. rincian prioritas nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; dan
 - d. rincian pagu alokasi anggaran per program dan per unit organisasi eselon I Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
- KEDUA : Renja KKP tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi unit organisasi eselon I untuk dijabarkan dalam rencana kerja dan anggaran tahun 2025.
- KETIGA : Dalam rangka pencapaian target kinerja, pimpinan unit organisasi eselon I melakukan monitoring dan evaluasi.
- KEEMPAT : Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA digunakan untuk melakukan perbaikan pelaksanaan rencana kerja.
- KELIMA : Pimpinan unit organisasi eselon I harus menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Renja KKP tahun 2025 setiap bulan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2024

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Effin Martiana

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 91 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2025

A. Arah Kebijakan

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dalam masa transisi, menjadi langkah awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

RKP Tahun 2025 dengan tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan dan/atau Kemiskinan Ekstrem. Delapan (8) Prioritas Nasional (PN) dalam RKP Tahun 2025 untuk mendukung pencapaian sasaran dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 terdiri atas: (1) memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM); (2) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian Bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (3) melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; (5) melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; (8) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Arah dan kebijakan KKP Tahun 2025 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagaimana tuntutan pembangunan global, terdiri atas:

1. memperluas kawasan konservasi laut;
2. penangkapan ikan terukur berbasis kuota penangkapan ikan;
3. Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan;
4. pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

5. pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut akan diperkuat dengan:

1. peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang didukung dengan penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk peningkatan konsumsi domestik dan ekspor;
2. peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan *advanced technology*; dan
3. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

B. Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		TARGET 2025
1.	Terwujudnya Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	1.	Tingkat pengelolaan konservasi (nilai)	63,7
2.	Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan	1.	Nilai kontribusi sektor kelautan terhadap PDB maritim (triliun rupiah)	2,25
		2.	Pertumbuhan PDB perikanan (%)	4,00-6,00
		3.	Volume produksi perikanan (juta ton)	24,58
		4.	Indeks pembangunan pulau-pulau kecil (skala 0-1)	0,49
		5.	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (%)	13,6
		6.	Indeks kepatuhan sektor kelautan dan perikanan (Indeks)	80,67
		7.	Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang berada pada batas biologis yang aman (%)	≤80
3.	Meningkatnya Nilai Tambah dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	1.	Nilai Ekspor Produk Perikanan (USD Miliar)	6,25
		2.	Angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	26,26
		3.	Persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standard mutu dan keamanan pangan (%)	70,00

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		TARGET 2025
4.	Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%)	75,00
5.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas	1.	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) KKP	90,05

C. Program Tahun 2025

Program Tahun 2025 melanjutkan nomenklatur dan jumlah program pada tahun 2022 sebanyak 5 (lima) program yang telah menggunakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) sebagai salah satu upaya reformasi perencanaan dan penganggaran. RSPP diharapkan dapat mewujudkan implementasi kebijakan *money follow program priority*, memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja, meningkatkan integrasi belanja antar kementerian/lembaga untuk tingkat Pemerintah Pusat, dan integrasi belanja pusat-daerah, serta mewujudkan keselarasan rumusan nomenklatur program, kegiatan dan output kegiatan yang mencerminkan *real work* atau konkret.

Nomenklatur program KKP tahun 2025 beserta sasaran program, indikator sasaran program, target, dan satuan sebagai berikut:

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	SATUAN
DL-Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	01-Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan	01-Persentase lulusan pendidikan kelautan dan perikanan yang terserap di dunia usaha, dunia industri dan/atau dunia kerja	85	persen
		02-Persentase lulusan pelatihan kelautan dan perikanan yang terserap di dunia usaha, dunia industri dan/atau dunia kerja	75	persen
		03-Rasio jumlah kelompok kelautan dan perikanan yang meningkat kelasnya	6,5	persen
	02-Termanfaatkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan oleh Masyarakat	01-Ilmu pengetahuan dan teknologi hasil penyuluhan, pendidikan dan pelatihan kelautan dan perikanan yang dimanfaatkan oleh masyarakat	54	paket
		02-Desa Perikanan Cerdas (<i>smart fisheries village</i>) yang menerapkan ilmu dan	1	desa

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	SATUAN
		pengetahuan teknologi hasil penyuluhan, pendidikan dan pelatihan kelautan dan perikanan		
		03-Percontohan penyuluhan dan pengabdian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan yang diterapkan	17	kelompok
	03-Terselenggaranya Tata Kelola yang Mendukung Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	01-Aparatur penyelenggara kegiatan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang meningkat kapasitas dan kompetensinya	550	orang
		02-Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang mendukung penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan	13	NSPK
		03-Sarana dan prasarana penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang meningkat kapasitasnya	17	paket
		04-Lembaga penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang tersertifikasi/ terakreditasi	26	lembaga
		05-Hasil pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan	1	laporan
EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	01-Meningkatnya Ekspor Produk Perikanan, Konsumsi Ikan dan Kelas Usaha Kelautan dan Perikanan	01-Nilai ekspor rumput laut	0,574	USD miliar
		02-Nilai ekspor produk perikanan lainnya	5,676	USD miliar
		03-Nilai pemasaran produk perikanan dalam negeri	310,51	Rp triliun
		04-Persentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan naik kelas	5	persen

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	SATUAN
	02-Sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan yang berdaya saing	01-Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	70	persen
		02-Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	70	persen
		03-Keberterimaan sistem jaminan mutu di negara tujuan ekspor	41	Negara
		04-Persentase pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan di wilayah RI	70	persen
		05-Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang ditetapkan	70	persen
FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	01-Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi dan di Perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau <i>Appendix CITES</i>	01-Luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	30	juta hektar
		02-Nilai efektifitas pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	50	nilai
		03-Nilai efektifitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi dan/atau <i>Appendix CITES</i> (25 jenis)	68,30	nilai
	02-Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih	01-Volume penanggulangan sampah dari aktivitas masyarakat di pesisir dan laut (kumulatif)	18	ton
	03-Meningkatnya Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	01-Nilai ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	55	nilai
HB-Program Pengelolaan	01-Kesejahteraan Nelayan Meningkat	01-Nilai tukar nelayan	105-108	indeks

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	SATUAN
Perikanan dan Kelautan	02-Meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	01-Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan	80	indeks
	03-Meningkatnya kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan	01-Indeks kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan	80	indeks
		02-Persentase keaktifan pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	90	persen
		03-Tingkat Keterlibatan Masyarakat (<i>engagement rate</i>) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	>1	persen
	04-Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	01-Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	82	indeks
		02-Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan tidak berizin	82	indeks
	05-Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	01-Indeks operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	92	indeks
		02-Indeks kesiapan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	80	indeks
	06-Tata kelola sumber daya Perikanan tangkap berkelanjutan	01-Persentase implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya ikan	80	persen
	07-Meningkatnya produksi perikanan budi daya secara berkelanjutan	01-Volume produksi ikan air tawar	3,92	juta ton
		02-Volume produksi ikan air payau	2,54	juta ton
		03-Volume produksi ikan air laut	0,29	juta ton

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	SATUAN
		04-Volume produksi rumput laut	11,64	juta ton
	08-Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut dan zonasi pesisir	01-Persentase penyelenggaraan penataan ruang laut kewenangan pemerintah pusat (%)	11,32	persen
		02-Persentase penyelenggaraan zonasi pesisir kewenangan pemerintah daerah (%)	19,51	persen
		03-Indeks kepatuhan pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (skala)	8	indeks
	09-Tersedianya perumusan kebijakan kelautan dan perikanan yang digunakan untuk penyusunan kebijakan	01-Jumlah hasil perumusan kebijakan responsif kelautan dan perikanan yang digunakan untuk penyusunan kebijakan	8	rekomen dasi kebijakan
	10-Meningkatnya pengusahaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil	01-Volume produksi garam (Juta Ton)	2,25	ton
		02- Persentase pulau-pulau kecil/terluar yang meningkat efektivitas pengelolaannya (kumulatif) (%)	20	persen
	12-Meningkatnya kelas usaha kelautan dan perikanan	01-Persentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan naik kelas	5	persen
	13-Produktivitas perikanan tangkap meningkat	01-Volume produksi perikanan tangkap	6,19	juta ton
WA-Program Dukungan Manajemen	01-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam kordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan KKP	01-Indeks reformasi birokrasi KKP	90,05	indeks
		02-Indeks profesionalitas ASN lingkup KKP	88	indeks
		03-Nilai keterbukaan informasi publik	94	nilai
		04-Nilai kinerja perencanaan anggaran KKP	85	nilai
		05-Nilai hasil penilaian proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan KKP	76	nilai

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	SATUAN
		06-Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan KKP	≤0,5	persen
		07-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup KKP	85	persen
		08-Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas Korupsi Lingkup Sekretariat Jenderal	7	unit kerja
	02-PNBP BLU sektor kelautan dan perikanan meningkat	01-Persentase pencapaian target PNBP layanan BLU LPMUKP	97	persen
		02-Persentase penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP	90	persen
	03-Pengawasan intern yang kapabel dan memberikan nilai tambah terhadap kinerja KKP	01-Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan KKP	≤0,5	persen
		02-Persentase implementasi reformasi birokrasi lingkup KKP	86	persen
		03-Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup KKP	85	persen
		04-Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap kinerja pengawasan inspektorat jenderal	4,05	indeks
	04-Tata kelola pengawasan intern yang akuntabel dan andal	01-Nilai kapabilitas pengawasan inspektorat jenderal	3,60	nilai
		02-Persentase implementasi sistem informasi manajemen pengawasan lingkup inspektorat jenderal	80	persen
		03-Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	86	persen
	05-Tata Kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	01-Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Ditjen Pengelolaan	86	nilai

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	SATUAN
	Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang laut	Kelautan dan Ruang Laut		
	06-Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel Ditjen Perikanan Tangkap	01-Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap	86	nilai
	07-Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen PDSPKP	01-Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP	86	nilai
	08-Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan BPPMHKP	01-Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup BPPMHKP	86	nilai
	09-Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel Ditjen Perikanan Budi Daya	01-Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Budi Daya	86	nilai
	10-Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel Ditjen PSDKP	01-Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Ditjen PSDKP	86	nilai
	11-Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel BPPSDMKP	01-Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi BPPSDMKP	86	nilai

D. Kegiatan Tahun 2025

Kegiatan pada tahun 2025 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kegiatan. Nomenklatur kegiatan KKP pada tahun 2025 beserta sasaran, indikator, target, dan satuannya adalah sebagai berikut:

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
2375-Pelatihan Kelautan dan Perikanan	01-Terselenggaranya pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia kelautan dan perikanan	01-Lulusan pelatihan kelautan dan perikanan yang terserap di dunia usaha, dunia industri, dan/atau dunia kerja	17.804	orang
		02-Sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang bersertifikat kompetensi	740	orang

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
	02-Tersedianya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pelatihan sumber daya manusia kelautan dan perikanan	01-Materi pelatihan kelautan dan perikanan berbasis kaji widya	1	paket
	03-Tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kelautan dan perikanan	01-Sarana pelatihan kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya	5	paket
		02-Prasarana pelatihan kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya	2	paket
	04-Terselenggaranya tata kelola pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan	01-Sertifikasi kelembagaan pelatihan sesuai standar lembaga Pelatihan	10	lembaga
		02-Norma, standar, prosedur dan kriteria pelatihan masyarakat yang disusun	3	NSPK
	2376-Pendidikan Kelautan dan Perikanan	01-Terselenggaranya pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten	01-Peserta pendidikan kelautan dan perikanan yang terserap di dunia usaha, dunia industri, dan/atau dunia kerja	2.134
02-Lulusan satuan pendidikan kementerian kelautan dan perikanan			2.507	orang
02-Tersedianya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pendidikan tinggi kelautan dan perikanan		01-Kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan	51	paket
		02-Pengabdian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan	14	kelompok
03-Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan kelautan dan perikanan yang terstandar		01-Peralatan dan mesin serta sarana teknologi informasi dan komunikasi bidang pendidikan kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya	5	paket
		02-Prasarana pendidikan menengah dan tinggi kelautan dan perikanan yang	3	paket

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		ditingkatkan kapasitasnya		
	04-Terselenggaranya tata kelola pendidikan kelautan dan perikanan	01-Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi	16	lembaga
		02-Tenaga pendidik kelautan dan perikanan yang tersertifikasi	500	orang
		03-Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) pendidikan kelautan dan perikanan	6	NSPK
		04-Lembaga pendidikan kelautan dan perikanan yang terkelola	16	lembaga
7020-Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	01-Terselenggaranya penyuluhan kelautan dan perikanan	01-Kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang disuluh	35.000	kelompok
		02-Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya	1.157	kelompok
		03-Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk	4.100	kelompok
	02-Tersedianya ilmu pengetahuan dan teknologi serta rekomendasi dan model pemberdayaan sosial ekonomi kelautan dan perikanan untuk penyuluhan kelautan dan perikanan	01-Rekomendasi dan model pemberdayaan sosial ekonomi kelautan dan perikanan	1	paket
		02-Percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan yang diterapkan	3	kelompok
		03-Inovasi yang diterapkan untuk penyuluhan masyarakat kelautan dan perikanan	1	paket
	03-Tersedianya Kegiatan Desa Perikanan Cerdas (<i>Smart Fisheries Village</i>) di lingkup Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	01-Desa Perikanan Cerdas (<i>Smart Fisheries Village</i>) yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup penyuluhan kelautan	1	desa

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		dan perikanan		
	04-Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan kelautan dan perikanan	01-Sarana penyuluhan kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya	1	paket
		02-Prasarana penyuluhan kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya	1	paket
	05-Terselenggaranya tata kelola penyuluhan kelautan dan perikanan	01- Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) penyuluhan kelautan dan perikanan	4	NSPK
		02-Penyuluh perikanan yang kompeten	50	orang
		03-Hasil pemantauan sosial ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan di lokasi program prioritas KKP	1	laporan

2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
2357-Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	01-Meningkatnya pangsa pasar produk olahan rumput laut	01-Proporsi ekspor produk rumput laut olahan	46,5	persen
	02-Meningkatnya pemasaran produk kelautan dan perikanan di luar negeri	01-Pertumbuhan ekspor produk perikanan	4,23	persen
	03-Meningkatnya kontribusi protein ikan dalam pemenuhan protein hewani	01-Kontribusi protein ikan terhadap sumber protein hewani	53	persen
2358-Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	01-Meningkatnya utilitas industri pengolahan produk kelautan dan perikanan	01-Persentase utilitas industri pengolahan produk kelautan dan perikanan	68,70	persen
	02-Meningkatnya produksi olahan kelautan dan perikanan	01-Produksi olahan kelautan dan perikanan	3,71	juta ton
3989-Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil	01-Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan	01-Persentase sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) diterbitkan pada unit pengolahan ikan	70	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
Kelautan dan Perikanan		skala UMKM dan menengah besar		
		02-Jumlah sertifikat <i>hazard analysis critical control point</i> (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (sertifikat)	3.000	sertifikat
		03-Persentase MOU/MRA sistem jaminan mutu dengan negara tujuan yang terselesaikan	70	persen
		04-Persentase unit usaha budi daya (CBIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan	70	persen
		05-Persentase unit usaha pembenihan ikan (CPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan	70	persen
		06-Persentase unit usaha produksi dan distribusi obat ikan (CPOIB dan CDOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan	75	persen
		07-Persentase unit usaha Produksi Pakan Ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan	75	persen
		09-Persentase kapal ikan (CPIB kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan	70	persen
7010-Manajemen Mutu	01-Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	01-Persentase Tindak lanjut Rekomendasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.	70	persen
		02-Persentase unit usaha/lembaga yang menerapkan SJMKHP (QA) sesuai standar dan regulasi	70	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		03-Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium	75	nilai
		04-Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi	75	nilai
		05-Standar Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Hulu Hilir	3	standar sistem
		06-Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan Negara tujuan ekspor	8	dokumen
5279-Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	01-Meningkatnya produk kelautan dan perikanan yang memenuhi persyaratan standar pengujian	01-Persentase produk yang memenuhi standar persyaratan pengujian	70	persen
7025-Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	01-Meningkatnya penerapan ketertelusuran produk perikanan	01-Persentase peningkatan pelaku usaha yang menerapkan sistem ketelusuran produk perikanan	27,2	persen
	02-Meningkatnya kinerja logistik ikan dalam negeri	01-Kinerja logistik ikan	72	indeks
7026-Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	01-Meningkatnya investasi kelautan dan perikanan	01-Nilai investasi kelautan dan perikanan	7,24	Rp triliun
	02-Meningkatnya omset UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan	01-Persentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan yang meningkat omsetnya	5	persen

3. Program Kualitas Lingkungan Hidup

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
2362-Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	01-Terwujudnya tata kelola kawasan konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi dan/atau <i>Appendix CITES</i>	01-Luas kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang baru	700.000	hektar
		02-Luas kawasan konservasi di Perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang efektif dikelola	18,50	juta hektar
		03-Tingkat kinerja pengelolaan kawasan konservasi di Perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	86	nilai
		04-Tingkat kinerja pengelolaan konservasi biota perairan langka, terancam punah, dilindungi dan/atau <i>Appendix CITES</i> (25 jenis)	66,39	nilai
4346-Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	01-Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil	01-Volume pengendalian sampah laut di wilayah pesisir dan laut	3	ton
		02-Volume sampah plastik yang dikelola dari aktivitas masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	15	ton
	02-Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi, dilakukan pengendalian perubahan iklim dan mitigasi bencana	01-Nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	55	nilai
		02-Nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan pengendalian perubahan iklim	55	nilai
		03-Nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan mitigasi bencana	55	nilai

4. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
2337-Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	01-Pengelolaan awak kapal perikanan, perikanan dan alat penangkapan berkelanjutan	01-Persentase awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi	13	persen
		02-Petugas pemeriksaan kelaikan kapal perikanan yang tersertifikasi	120	orang
		03-Rekomendasi tata kelola alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang diterbitkan	3	dokumen
		04-Persentase permohonan persetujuan pengadaan kapal perikanan	100	persen
		05-Persentase mesin kapal bantuan yang dimanfaatkan oleh masyarakat	92	persen
		06-Petugas ahli ukur kapal perikanan yang tersertifikasi	30	orang
		07-Alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi ketentuan	11.000	unit
		08-Standar permesinan kapal perikanan yang diterbitkan	1	dokumen
		09-Persentase awak kapal perikanan di atas 30 GT yang terlindungi	13	persen
		10-Kapal perikanan izin pusat yang memenuhi ketentuan	1.300	kapal
		11-Kapal perikanan kewenangan pusat yang terdaftar	1.600	unit
2338-Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	01-Pengelolaan pelabuhan perikanan yang optimal dan bertanggung jawab	01-Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme <i>Port State Measures Agreement</i> (PSMA) (Persen)	78	persen
		02-Tingkat kinerja penerapan pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)	79	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		03-Tingkat pelayanan di pelabuhan perikanan	49	persen
		04-Persentase pelaksanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan <i>fish market</i> bertaraf internasional yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri	100	persen
		05-Persentase pelaksanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang menerapkan konsep <i>eco fishing port</i> yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri	100	persen
		06-Rencana pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan	2	dokumen
		07-Persentase pelabuhan perikanan dengan tingkat operasional optimum	29	persen
		08-Tingkat kinerja kesyahbandaran di pelabuhan perikanan	79	persen
		09-Persentase lokasi pelabuhan perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan	37	persen
		10-Persentase pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)	42	persen
		11-Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya	15	persen
		12-Persentase operasional SKPT	86	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
2339-Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	01-Pengelolaan perizinan bertanggung jawab dan sesuai ketentuan	01-Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan (alokasi kapal)	12.000	alokasi kapal
		02-Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan serta sertifikat kuota penangkapan ikan yang diterbitkan	9.000	dokumen
		03-Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti	91	persen
		04-Indeks kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	3	indeks
		05-Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur	91	persen
		06-Persentase ketersediaan aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	96	persen
		07-Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (persen)	100	persen
	02-Pengelolaan kenelayanan yang berdaya saing	01-Persentase kelompok usaha bersama yang meningkat kapasitasnya	100	persen
		02-Jumlah Nelayan yang diidentifikasi dalam rangka perlindungan nelayan	50.000	orang
		03-Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui	5.000	orang

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		program sertifikasi tanah nelayan		
		04-Persentase nelayan yang terlindungi	100	persen
		05-Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya melalui program kampung nelayan modern	1	lokasi
2341-Pengelolaan Sumber Daya Ikan	01-Pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan	01-Persentase zona penangkapan ikan yang dihitung alokasi kuotanya	100	persen
		02-Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan log book penangkapan ikan	67	persen
		03-Tingkat kualitas laporan pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan	86	nilai
		04-Persentase hari layar pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan	100	persen
		05-Persentase kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang terdaftar di RFMO'S yang dilakukan pemantauan	100	persen
		06-Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh yang diterima di forum regional	100	persen
		07-Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan	78	persen
		08-Persentase <i>harvest strategy</i> di laut teritorial dan perairan kepulauan yang disusun	76	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		09-Persentase pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral, dan regional pengelolaan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan	81	persen
		10-Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas	83	persen
		11-Persentase WPPNRI perairan darat yang status pengelolaannya meningkat	100	persen
		12-Persentase profil pengelolaan perikanan WPPNRI perairan darat yang tersusun	100	persen
	02-Produktivitas perikanan perairan darat meningkat	01-Persentase jumlah WPP perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya	75	persen
2350-Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	01-Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang operasi armada dan peningkatan prasarana dan sarana PSDKP	01-Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang operasi armada serta pengembangan prasarana dan sarana PSDKP	100	persen
	02-Terselenggaranya operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara efektif	01-Indeks kinerja operasi pesawat patroli	95	indeks
		02-Indeks kinerja operasi kapal pengawas	92	indeks
		03-Indeks kinerja operasi <i>speedboat</i> pengawas	92	indeks
		04-Indeks kesiapan logistik dan awak kapal pengawas	100	indeks
	03-Terselenggaranya pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang sesuai ketentuan	01-Persentase prasarana dan sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan	100	persen
		02-Indeks kualitas pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP	100	indeks
		03-Nilai supervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan SDKP	82	nilai

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		04-Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP	100	persen
2351-Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	01-Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	01-Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	81	indeks
		02-Indeks tindak lanjut hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	81	indeks
		03-Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	81	indeks
		04-Indeks penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif	81	indeks
	02-Terselenggaranya penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara efektif dan sesuai ketentuan	01-Persentase penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	80	persen
		02-Persentase penyelesaian kewajiban pelaku usaha atas penyelesaian sengketa	76	persen
	03-Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	01-Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	81	indeks
		02-Indeks kualitas supervisi dan evaluasi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan	75	indeks
		03-Indeks sinergi penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan dengan lembaga lain	71	indeks
		04-Persentase penyelesaian analisis data dan informasi intelijen penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan	100	persen
	04-Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang penanganan pelanggaran	01-Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang	100	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
	sektor kelautan dan perikanan	penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan		
2352-Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	01-Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	01-Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan	82	indeks
		02-Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan	100	indeks
		03-Indeks verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan	82	indeks
		04-Indeks penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan	62	indeks
	02-Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi	01-Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPPNRI	100	persen
		02-Tingkat akurasi dan validitas analisis hasil pemantauan SDKP	75	nilai
		03-Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan sistem pemantauan kapal perikanan	82	indeks
	03-Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	01-Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan	75	nilai
		02-Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan	75	nilai
	04-Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	01-Indeks kepatuhan pelaku usaha perikanan	82	indeks
		02-Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan	100	indeks
		03-Indeks verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan	82	indeks
		04-Indeks penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan	62	indeks
	06-Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	01-Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pemantauan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
2353- Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	01-Terbentuknya regulasi tata kelola kelautan dan perikanan yang memiliki efek gentar	01-Kandungan elemen pengawasan, penegakan hukum, dan pengenaan sanksi dalam regulasi tata kelola kelautan dan perikanan	Ada	ada/ tidak ada
	02-Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif	01-Tingkat kualitas respon/pemahaman <i>audiens</i> sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan	80	nilai
	03-Terselenggaranya pembinaan pokmaswas secara efektif	01-Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	82	indeks
		02-Indeks kualitas supervisi pembinaan pokmaswas	82	indeks
	04-Terselenggaranya pelibatan masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang masif	01-Intensitas konten media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	5	konten/ minggu
		02-Persentase pemberitaan netral dan positif tentang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	85	persen
2363-Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	01-Meningkatnya produktivitas lahan garam rakyat	01-Produktivitas lahan garam rakyat	83	ton/ha
		02-Korporasi petambak garam yang dikembangkan	-	korporasi
	02-Meningkatnya usaha kelautan berkelanjutan	01-Persentase pemanfaatan air laut dan biofarmakologi produk kelautan (kumulatif)	-	persen
		02-Kawasan yang terfasilitasi pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan instalasi di laut	3	kawasan
		03-Persentase pengendalian reklamasi dan sumber material reklamasi	100	persen
		04-Nilai efektivitas pengelolaan wisata bahari	70	nilai
		05-Persentase penyelesaian perizinan berusaha jasa kelautan	100	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
2365-Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	01-Meningkatnya pengelolaan pulau-pulau kecil/terluar	01-Pulau-pulau kecil yang dimanfaatkan dan ditingkatkan nilai investasinya (kumulatif)	19	pulau
		02-Pulau-pulau kecil terluar yang meningkat aksesibilitasnya	1	pulau
		03-Kelompok masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang diberikan bantuan sarana ekonomi produktif	55	kelompok
	03-Meningkatnya kemandirian masyarakat hukum adat	01-Nilai kemandirian masyarakat hukum adat	50	kelompok
2366-Perencanaan Ruang Laut	01-Tersusunnya perencanaan ruang laut dan zonasi pesisir	01-Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen rencana zonasi kawasan antar wilayah (RZ KAW)	3	lokasi
		02-Kawasan strategis nasional yang memiliki dokumen rencana zonasi kawasan strategis nasional (RZ KSN)	3	lokasi
		03-Kawasan strategis nasional tertentu yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)	3	lokasi
		04-Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun	1	dokumen
		05-Perairan KSNT Non PPKT yang memiliki rencana zonasi ditetapkan melalui Peraturan Perundang-undangan	2	lokasi
		06-Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	8	provinsi

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
	02-Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut	01-Persentase Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang diterbitkan	17,39	persen
		02-Persentase KKPRL yang dimonitoring dan evaluasi	20	persen
	03-Terfasilitasinya hasil sedimentasi di laut	01-Wilayah laut yang memiliki dokumen perencanaan pengelolaan hasil sedimentasi	5	dokumen
		02-Persentase lokasi yang difasilitasi pengelolaan hasil sedimentasi di laut	100	persen
7021-Pengelolaan Budi Daya Rumput Laut	01-Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut	01-Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat	170	unit
		02-Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut	6	rekomen dasi kebijakan
		03-Bibit rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat	31.798	kg/unit
		04-Infrastruktur Kawasan Budidaya Rumput Laut - <i>'Ocean for Prosperity - Infrastructure for Coral Reef Areas</i>	1	unit
		05-Unit Budi Daya yang dibina penerapan Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB)	14	lembaga
7022-Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau	01-Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Air Payau	01-Produksi Induk Unggul Ikan Air Payau untuk bantuan dan operasional UPT	6.411	ekor
		02-Produksi Induk Unggul Udang untuk bantuan dan operasional UPT	191.744	ekor
		03-Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat	2.964.669	ekor

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		04-Benih Udang yang disalurkan ke masyarakat	40.058.988	ekor
		05-Benih Ikan Air Payau yang diproduksi	3.382.065	ekor
		06-Benih Udang yang diproduksi	35.870.400	ekor
		07-Pakan Ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)	94.670	unit
		08-Ikan Konsumsi air payau hasil budi daya yang diproduksi	223.542	unit
		09-Unit Budidaya Ikan Air Payau yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budidaya (CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB)	207	lembaga
		10-Sampel penyakit ikan, pakan dan obat ikan air payau yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	5.003	sampel
		11-Sampel Monitoring Residu, Penyakit Ikan, dan <i>Surveillance</i> Resistensi Anti Mikroba (AMU/AMR) yang diuji	596	sampel
		12- <i>Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture (IISAP)</i>	7	unit
		13-Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP)	25	unit
		14-Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Air Payau	6	rekomen dasi kebijakan
7023-Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut	01-Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Air Laut	01-Produksi Induk Unggul Ikan Air Laut untuk bantuan dan operasional UPT	10.037	ekor
		02-Produksi Induk Unggul Kepiting untuk bantuan dan operasional UPT	89	ekor

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		03-Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat	1.774.489	ekor
		04-Benih Kepiting yang disalurkan ke masyarakat	174.574	ekor
		05-Benih Ikan Air Laut yang diproduksi	170.811	ekor
		06-Benih Kepiting yang diproduksi	189.790	ekor
		07-Pakan Ikan Air Laut yang diproduksi untuk operasional UPT	13.927	unit
		08-Sarana budi daya ikan laut yang disalurkan ke masyarakat	20	unit
		09-Unit Budidaya Ikan Air Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budidaya (CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB)	23	lembaga
		10-Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	1.993	sampel
		11-Sampel Monitoring residu dan monitoring penyakit ikan yang diuji	129	sampel
		12-Kluster Komoditas Unggulan Ikan Air Laut berbasis kawasan	1	unit
		13-Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut	6	rekomendasi kebijakan
7024-Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar	01-Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Air Tawar	01-Produksi Induk Unggul Ikan Air Tawar untuk bantuan dan operasional UPT	274.658	ekor
		02-Benih Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	27.108.670	ekor
		03-Benih Ikan Air tawar yang diproduksi	7.401.833	ekor

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		04-Pakan Ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)	147.806	unit
		05-Unit Budi daya Ikan Air Tawar yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi daya (CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB)	375	lembaga
		06-Sampel penyakit ikan air tawar yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	2.832	sampel
		07-Sampel pakan dan obat ikan yang diuji	128	sampel
		08-Sampel Monitoring Residu dan monitoring penyakit ikan yang diuji	286	sampel
		09- Perikanan budi daya yang berkelanjutan dan bebas konversi	1	unit
		10-Sarana Budi Daya Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	219	unit
		11-Pakan dan Obat Ikan yang diregistrasi	38	produk
		12-Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau	6	rekomen dasi kebijakan

4. Program Dukungan Manajemen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
2322-Legislasi, Litigasi, dan Kerja Sama	01-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang penyiapan produk hukum KKP	01-Indeks reformasi hukum KKP	85	indeks
		02-Indeks kualitas kebijakan KKP	85	indeks
		03-Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan menteri dan keputusan menteri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	100	persen
		04-Permasalahan hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di lingkungan Kementerian	100	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		Kelautan dan Perikanan yang ditangani		
		05-Permasalahan hukum di luar jalur pengadilan/nonlitigasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditangani	100	persen
		06-Perjanjian nasional bidang kelautan dan perikanan yang siap untuk ditandatangani	100	persen
		07-Instrumen hukum internasional bidang kelautan dan perikanan yang diberikan pertimbangan hukum	100	persen
		08-Nilai kinerja pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Kelautan dan Perikanan	92	nilai
	02-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengelolaan kerjasama antarlembaga	01-Persentase kontribusi kerja sama bidang kelautan dan perikanan terhadap program prioritas	82	persen
		02-Persentase dokumen/naskah kerja sama yang disetujui pimpinan para pihak	95	persen
		03-Persentase posisi/rekomendasi/pra karsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional	94	persen
	03-Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pengelolaan Kerjasama Luar Negeri	03-Persentase kesepakatan kerjasama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti	95	persen
		04-Persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	88	persen
		05-Persentase posisi/rekomendasi/pra karsa Indonesia di bidang kelautan dan	93	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		perikanan yang diterima di forum internasional		
		06-Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan	100	persen
2323-Pengelolaan Organisasi dan SDM	01-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di pengelolaan SDM aparatur dan organisasi	01-Nilai implementasi RB KKP	86	nilai
		02-Indeks sistem merit KKP	394	indeks
		03-Indeks profesionalitas ASN setjen	87	indeks
		04-Indeks implementasi norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) manajemen ASN	85	indeks
		05-Indeks pembinaan JF KKP	72	indeks
		06-Nilai kelayakan penyelenggara penilaian kompetensi KKP	70	nilai
		07-Persentase penyederhanaan struktur organisasi KKP	100	persen
		08-Penetapan penghargaan ASN bidang kelautan dan perikanan tingkat nasional	5	nilai
		09-Tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi KKP	5	nilai
		10-Indeks berAKHLAK KKP	70	indeks
		11-Persentase rekomendasi kebutuhan JF daerah	82	persen
2325-Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	01-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengelolaan program, anggaran, dan kinerja organisasi	01-Nilai SAKIP KKP	85	nilai
		02-Persentase proyek PHLN KKP yang berstatus at risk	<59	persen
		03-Persentase dokumen pendanaan luar negeri KKP yang teregister	95	persen
		04-Capaian IKU KKP	75	nilai

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		05-Capaian prioritas nasional KKP	91	nilai
		06-Nilai komponen penetapan tujuan pada maturitas SPIP KKP	1,8	nilai
		07-Persentase pelaksanaan kegiatan lintas sektor	83	persen
		08-Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) KKP	92	indeks
		09-Nilai PM SAKIP Sekretariat Jenderal	87	nilai
		10-Persentase peningkatan anggaran melalui pendanaan kolaboratif dan inovatif dalam rangka mendukung ekonomi biru	10	persen
		11-Persentase Kesesuaian Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mendukung Kebijakan Nasional	95	persen
	04-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang pengelolaan keuangan, dan BMN	01-Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan	WTP	opini
		02-Level Maturitas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan	3	level
		03-Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan	92	nilai
		04-Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Kelautan dan Perikanan	3,36	indeks
		05-Indeks pengelolaan BLU Kementerian Kelautan dan Perikanan	3	indeks
		06-Persentase Pengelolaan PNBPN sektor kelautan dan perikanan	100	persen
		07-Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Setjen dibandingkan realisasi anggaran sekretariat jenderal TA 2024	<0,5	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		08-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan kinerja di lingkungan sekretariat jenderal	95	persen
		09-Nilai kinerja perencanaan anggaran sekretariat jenderal	81,5	nilai
		10-Persentase implementasi standar biaya keluaran KKP	100	persen
2328-Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	01-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang pengelolaan komunikasi, dan informasi publik	01-Indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP	95	indeks
		02-Nilai penilaian mandiri keterbukaan informasi publik KKP	94	nilai
		03-Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan	95	persen
		04-Nilai kepuasan terhadap layanan perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan	90	nilai
	02-Tata kelola pemerintah yang baik di bidang pengelolaan administrasi, pengadaan barang/jasa dan ketatausahaan pimpinan	01-Tingkat digitalisasi arsip KKP	85	nilai
		02-Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa KKP	85	indeks
		03-Nilai realisasi pagu paket yang dilakukan tender dibandingkan total pagu paket yang diumumkan dalam RUP	5	nilai
		04-Nilai survei kepuasan masyarakat layanan protokoler dan ketatausahaan pimpinan	85	nilai
		05-Indeks survei kepuasan masyarakat layanan kerumahtanggaan kantor pusat	85	indeks
		06-Nilai pengawasan kearsipan Sekretariat Jenderal KKP	80	nilai

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		07-Persentase rencana umum pengadaan Sekretariat Jenderal yang diumumkan pada SiRUP	80	persen
		08-Persentase pelaksanaan manajemen hemat energi KKP	75	persen
		09-Persentase usulan tender yang ditindaklanjuti UKPBJ KKP	100	persen
	03-Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup level II Setjen	01-Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi	75	nilai
		02-Nilai PM SAKIP level II Setjen	87	nilai
		03-Indeks profesionalitas ASN level II Setjen	87	indeks
		04-Persentase penyelesaian temuan BPK level II setjen	100	persen
		05-Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja level II Setjen	85	persen
		06-Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Perundang-Undangan level II setjen	100	persen
		07-Persentase penyerapan anggaran level II Setjen	>95	persen
2329-Pengelolaan Data dan Informasi	01-Tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan data dan informasi KP	01-Tingkat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan	91	persen
		02-Indeks layanan aplikasi sistem informasi	3,5	indeks
		03-Persentase layanan sistem informasi pusat kontrol maritim	77	persen
		04-Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP	3,85	indeks

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		05-Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan KKP	76	nilai
		06-Persentase pemenuhan data citra satelit untuk pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	90	persen
		07-Persentase pemenuhan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan yang terpenuhi	100	persen
		08-Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP	3	indeks
		09-Tingkat maturitas satu data kelautan dan perikanan	70	persen
		10-Tingkat implementasi kebijakan arsitektur SPBE KKP	3	nilai
		11-Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral KKP	2,75	nilai
		12-Indeks pelayanan publik KKP	4,6	indeks
		13-Tingkat kepatuhan standar pelayanan publik KKP	88,87	nilai
		14-Survei kepuasan masyarakat (SKM) KKP	89,6	nilai
		15-Persentase Unit Kerja Setjen yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	94	persen
6453-Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	01-Terkelolanya modal usaha kelautan dan perikanan	01-Realisasi PNBP badan layanan umum	30	Rp miliar
		02-Realisasi penyaluran pinjaman Dana bergulir lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan	1,7	Rp triliun
		03-Persentase hasil perhitungan capaian rasio dana bergulir diragukan tertagih	100	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		04-Penyelesaian modernisasi Badan Layanan Umum (BLU)	81	nilai
		05-Nilai kepuasan pemanfaatan atas layanan lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan	86	nilai
		07-Persentase peningkatan usaha debitur penerima pelatihan atau pendampingan usaha	81	persen
2335-Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP	01-Pengawasan intern yang kapabel dan memberikan nilai tambah terhadap kinerja mitra	01-Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan mitra inspektorat	≤0,5	persen
		02-Persentase implementasi reformasi birokrasi lingkup mitra inspektorat	86	persen
		03-Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja mitra inspektorat	85	persen
		04-Jumlah rekomendasi kebijakan pengawasan kepada mitra itjen KKP	18	rekomen dasi
		05- Nilai Penilaian Mandiri Pembangunan Integritas lingkup KKP	76	nilai
		06-Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat lingkup KKP	100	persen
	02-Tata kelola pengawasan intern yang akuntabel dan andal	01-Nilai hasil telaah sejawat inspektorat lingkup Inspektorat jenderal	85	nilai
		02-Persentase implementasi sistem informasi manajemen pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal	80	persen
		03-Tingkat kepatuhan pengelolaan kinerja dan anggaran lingkup Inspektorat Jenderal	100	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
2336-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Inspektorat Jenderal	01-Manajemen kinerja inspektorat jenderal yang akuntabel	01-Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LK Inspektorat Jenderal	≤0,5	persen
		02-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Inspektorat Jenderal	85	persen
		03-Penilaian mandiri SAKIP Inspektorat Jenderal	88	nilai
		04-Nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran Inspektorat Jenderal	92	nilai
		05-Nilai kinerja perencanaan anggaran Inspektorat Jenderal	81,5	nilai
		06-Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Inspektorat Jenderal	3,5	nilai
		07-Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	88	indeks
		08-Nilai pengawasan kearsipan internal Inspektorat Jenderal	80	nilai
		09-Persentase rencana umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP Inspektorat Jenderal	76	persen
		10-Indeks kepuasan mitra terhadap kinerja pengawasan Inspektorat Jenderal	4,05	indeks
		11-Persentase penyelesaian rancangan regulasi dan tata kelola lingkup Inspektorat Jenderal	100	persen
		12-Persentase pemenuhan dukungan layanan pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal	100	persen
		13-Persentase fasilitasi sistem informasi manajemen pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal	80	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		14-Nilai penilaian mandiri pembangunan integritas lingkup inspektorat jenderal	76	nilai
2342-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	01-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	01-Nilai kinerja perencanaan anggaran Ditjen Perikanan Tangkap	81,5	nilai
		02-Indeks profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap	87	indeks
		03-Penilaian mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap	88	persen
		04-Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis Ditjen Perikanan Tangkap	81	persen
		05-Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap	3,5	nilai
		06-Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap	76	persen
		07-Persentase pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap	81	persen
		08-Tingkat kepatuhan pengelolaan data Ditjen Perikanan Tangkap	90	persen
		09-Persentase implementasi kerja sama bidang perikanan tangkap	82	persen
		10-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen Perikanan Tangkap	85	persen
		11-Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap	≤ 0,5	persen
		12-Nilai survey Kepuasan masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap	88,5	nilai

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		13-Rasio pemberitaan positif dan netral bidang perikanan tangkap	100	persen
		14-Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang perikanan tangkap	100	persen
		15-Persentase penyelesaian masalah hukum	100	nilai
		16-Persentase unit kerja berpredikat menuju WBK di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	54	persen
		17-Unit kerja lingkup ditjen perikanan tangkap yang menerapkan inovasi pelayanan publik	1	unit kerja
		18-Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Tangkap	80	nilai
		19-Indikator kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen Perikanan Tangkap	92	nilai
2348-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya	01-Terwujudnya layanan dukungan manajerial yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya	01-Nilai PM SAKIP lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya	84	nilai
		02-Indeks profesionalitas ASN lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya	87	indeks
		03-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya	85	persen
		04-Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya	81,50	nilai
		05-Tingkat kepatuhan pengelolaan data Ditjen Perikanan Budi Daya	96	persen
		06-Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan menteri dan keputusan	100	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		menteri di bidang perikanan budi daya		
		07-Nilai pengawasan kearsipan lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya	80	nilai
		08-Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya	3,5	nilai
		09-Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Budi Daya	<0,5	persen
		10-Persentase Unit kerja berpredikat menuju WBK di lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya	75	persen
		11-Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Budi Daya	76	persen
		12-Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Perikanan Budi Daya	92	nilai
		13-Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis Ditjen Perikanan Budi Daya	81	persen
2355-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	01-Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	01-Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen PSDKP	85	persen
		02-Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen PSDKP	<0,5	persen
		03-Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategi Ditjen PSDKP	81	persen
		04-Unit Kerja Ditjen. PSDKP berpredikat menuju WBK	16	unit
		05-Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP	88	nilai

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		06-Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PSDKP	92	nilai
		07-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen PSDKP	81,5	nilai
		08-Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen PSDKP	3,5	nilai
		09-Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PSDKP	87	indeks
		10-Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	100	persen
		11-Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen. PSDKP	80	nilai
		12-Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SiRUP Ditjen. PSDKP	76	persen
		13-Persentase Penyelesaian Kelengkapan data dukung Nilai Kinerja Anggaran	100	persen
		14-Persentase Penyelesaian Kelengkapan data dukung Nilai IKPA	100	persen
		15-Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PSDKP	95	persen
		16-Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	100	persen
		17-Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	85	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		18-Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Ditjen PSDKP	100	persen
		19-Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Ditjen PSDKP	88,5	nilai
		20-Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	88,5	nilai
		21-Persentase pelaksanaan pengelolaan survey kepuasan masyarakat lingkup Ditjen PSDKP	100	persen
		22-Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	70	indeks
		23-Persentase penyelesaian NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Ditjen PSDKP	100	persen
		24-Tingkat pemahaman peserta pelatihan/bimtek bidang kesekretariatan Ditjen PSDKP	78	nilai
		25-Tingkat kelulusan peserta Diklat teknis Ditjen PSDKP	83	persen
		26-Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	1	inovasi
		27-Persentase pelaksanaan pengelolaan inovasi lingkup Ditjen PSDKP	100	persen
		28-Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70	nilai
		29-Nilai Internal Keterbukaan Informasi Publik Ditjen PSDKP	60	nilai
		30-Indeks efektifitas pengelolaan data dan informasi Ditjen PSDKP	80	indeks
		31-Persentase unit kerja yang menerapkan sistem	95	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		manajemen pengetahuan yang terstandar unit kerja lingkup Ditjen PSDKP		
		32-Tingkat kepatuhan BMN Ditjen PSDKP	82,5	persen
		33-Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	75	nilai
		34-Persentase Implementasi Kerja Sama Luar Negeri	80	persen
		35-Persentase Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang Ditandatangani	80	persen
		36-Indeks Efektivitas Kinerja Sekretariat RPOA-IUU	80	indeks
2361-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	01-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	01-Indikator kinerja pelaksanaan anggaran di lingkungan Ditjen PDSPKP	92	nilai
		02-Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Ditjen PDSPKP	87	indeks
		03-Penilaian mandiri SAKIP di lingkungan Ditjen PDSPKP	86	nilai
		04-Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Ditjen PDSPKP	3,5	nilai
		05-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Ditjen PDSPKP	85	persen
		06-Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LK di lingkungan Ditjen PDSPKP	<0,5	persen
		07-Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis di lingkungan Ditjen PDSPKP	81	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		08-Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan menteri dan keputusan menteri di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	100	persen
		09-Persentase unit kerja berpredikat menuju WBK di lingkungan di lingkungan Ditjen PDSPKP	100	persen
		10-Nilai kinerja perencanaan anggaran di lingkungan Ditjen PDSPKP	81,5	nilai
		11-Tingkat kepatuhan pengelolaan data di lingkungan Ditjen PDSPKP	96	persen
		12-Nilai pengawasan kearsipan internal di lingkungan Ditjen PDSPKP	80	nilai
		13-Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SiRUP di lingkungan Ditjen PDSPKP	76	persen
		14-Rasio jumlah pemberitaan negatif bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan terhadap total pemberitaan sektor kelautan dan perikanan	≤5	persen
		15-Persentase permasalahan hukum yang ditangani lingkup Ditjen PDSPKP	100	persen
		16-Persentase pemenuhan layanan internal/overhead lingkup DJPDSPKP	100	persen
2367-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	01-Terwujudnya layanan Dukungan manajerial yang baik lingkup ditjen pengelolaan kelautan dan ruang laut	01-Nilai PM SAKIP Ditjen PKRL	88	nilai
		02-Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPKRL	92	nilai
		03-Nilai kinerja perencanaan anggaran DJPKRL	81,5	nilai

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		04-Indeks profesionalitas ASN DJPKRL	87	indeks
		05-Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan DJPKRL	<0,5	persen
		06-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja DJPKRL	85	persen
		07-Unit kerja berpredikat menuju WBK di lingkungan DJPKRL	8	unit kerja
		08-Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP DJPKRL	3,5	nilai
		09-Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis DJPKRL	81	persen
		10-Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP DJPKRL	76	persen
		11-Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	100	persen
		12-Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data DJPKRL	91	persen
		13-Nilai pengawasan kearsipan internal DJPKRL	80	nilai
2378-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	01-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan	01-Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPSDMKP	85	persen
		02-Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP	≤0,5	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		03-Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis BPPSDMKP	81	persen
		04-Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di lingkungan BPPSDMKP	17	unit kerja
		05-Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP	88	nilai
		06-Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP	92	nilai
		07-Nilai kinerja perencanaan anggaran BPPSDMKP	81,5	nilai
		08-Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP BPPSDMKP	3,5	nilai
		09-Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP	87	indeks
		10-Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan menteri dan keputusan menteri di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan	100	persen
		11-Nilai pengawasan kearsipan internal BPPSDMKP	80	nilai
		12-Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP	76	persen
3987-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan	01-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan badan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	01-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPMHKP	85	persen
		02-Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPMHKP	<0,5	persen
		03-Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis BPPMHKP	81	indeks

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		04-unit kerja berpredikat menuju WBK di lingkungan BPPMHKP	2	unit kerja
		05-Nilai PM SAKIP BPPMHKP	86	nilai
		06-Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BPPMHKP	92	nilai
		07-Nilai kinerja perencanaan anggaran BPPMHKP	81,50	nilai
		08-Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP BPPMHKP	3,5	nilai
		09-Indeks profesionalitas ASN BPPMHKP	87	indeks
		10-Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan menteri dan keputusan menteri di bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	100	persen
		11-Nilai pengawasan kearsipan internal BPPMHKP	80	nilai
		12-Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPMHKP	76	persen
		13-Indeks survey kepuasan masyarakat lingkup BPPMHKP	3,36	indeks
4345-Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan	01-Aparatur KKP yang dididik dan dilatih	01-Aparatur KKP yang diberikan beasiswa	167	orang
		02-Aparatur KKP yang diberikan izin belajar	68	orang
		03-Aparatur KKP yang mendapat pendidikan dan pelatihan (diklat)	4.525	orang

E. Dukungan terhadap Prioritas Nasional
PN yang akan dilaksanakan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2025 berdasarkan program adalah sebagai berikut:

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM
Prioritas Nasional #2: memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
	Program Kualitas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
	Program Dukungan Manajemen
Prioritas Nasional #5: melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Prioritas Nasional #8: memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Program Kualitas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

Pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2025 diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, memperkuat struktur ekonomi yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Effin Martiana

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 91 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2025

MATRIKS RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
01-Sekretariat Jenderal	
WA-Program Dukungan Manajemen	
2322-Legislati, Litigasi dan Kerjasama	
AEC-Kerja sama	
002-Kesepakatan Kerja Sama Antar Lembaga	2.252.372
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	
957-Layanan Hukum	7.900.000
969-Layanan Bantuan Hukum	600.000
PEC-Kerja sama	
001-Kerjasama Internasional bidang Kelautan dan Perikanan	5.500.000
2323-Pengelolaan Organisasi dan SDM	
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	
960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.250.000
EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	
954-Layanan Manajemen SDM	11.383.782
2325-Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	
AEA-Koordinasi	
001-Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi antar Mitra dan Stakeholder Kelautan dan Perikanan	10.099.963
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	
956-Layanan BMN	1.390.000
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	
952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	13.867.500

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.680.000
955-Layanan Manajemen Keuangan	6.224.628
2328-Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	
BMB-Komunikasi Publik	
001-Layanan Komunikasi Publik	12.191.014
CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
001-Alat Pengolah Data dan Komunikasi Lingkup Setjen	3.571.622
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	
958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	3.206.000
959-Layanan Protokoler	28.623.778
962-Layanan Umum	55.084.270
994-Layanan Perkantoran	301.756.848
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	
951-Layanan Sarana Internal	15.669.766
971-Layanan Prasarana Internal	11.649.051
2329-Pengelolaan Data dan Informasi	
BMA-Data dan Informasi Publik	
001-Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan	3.648.560
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	
960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3.092.495
FAB-Sistem Informasi Pemerintahan	
001-Sistem Informasi Pemerintahan	12.233.365
QMA-Data dan Informasi Publik	
001-Layanan Data Kelautan dan Perikanan	4.600.000
RAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
001-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	10.000.000
002-Sarana Data Citra Satelit Radar	606.731
RCL-OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
001-OM Sarana Data Citra Satelit Radar	4.459.766
6453-Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	
BDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
001-UMKM yang Dilayani Permodalan BLU	8.644.323
BIF-Pengawasan dan Pengendalian Layanan	
001-Layanan Pengelolaan Risiko Modal Usaha	1.950.434
BMA-Data dan Informasi Publik	
001-Layanan Teknologi Informasi LPMUKP	497.600
CAN-Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
001-Layanan Pengadaan Perangkat TIK	120.000
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	
962-Layanan Umum	3.168.205
994-Layanan Perkantoran	22.779.369
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	
951-Layanan Sarana Internal	35.000
FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	
001-Laporan Pengelolaan Keuangan	746.502
002-Laporan Pengawasan Internal Pengelolaan Modal Modal Usaha	594.144
003-Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Pengelolaan Dana Bergulir	171.730
02-Inspektorat Jenderal	
WA-Program Dukungan Manajemen	
2335-Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan Kelautan dan Perikanan	
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	
952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	206.800
953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	720.000
955-Layanan Manajemen Keuangan	526.667
961-Layanan Reformasi Kinerja	120.960
965-Layanan Audit Internal	28.760.269
974-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	155.127
2336-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Inspektorat Jenderal	
CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
001-Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1.375.000
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
956-Layanan BMN	125.802
957-Layanan Hukum	197.482
960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	214.725
962-Layanan Umum	336.881
963-Layanan Data dan Informasi	952.450
994-Layanan Perkantoran	43.592.339
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	
951-Layanan Sarana Internal	1.845.500
EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	
954-Layanan Manajemen SDM	516.624
996-Layanan Pendidikan dan Pelatihan	2.266.543
03-Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2337-Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	
ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
002-Rekomendasi Bahan standar, teknis dan desain sarana penangkapan ikan yang disusun	1.000.000
003-Rekomendasi kebijakan pengelolaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang disusun	550.000
004-Rekomendasi kebijakan pengelolaan Permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan	500.000
ACA-Perizinan Produk	
001-Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan	1.250.000
ADC-Sertifikasi Produk	
001-Sarana Penangkapan Ikan yang diuji dan disertifikasi	750.000
BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
001-Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan	1.512.087
BKB-Pemantauan Produk	
001-Bantuan sarana penangkapan ikan yang dipantau pemanfaatannya	250.000
FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	
001-Pemerintah daerah yang difasilitasi dan dibina penerbitan dokumen kapal perikanannya (TP)	-
PCA-Perizinan Produk	
001-Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan	261.350

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
002-Dokumen bukti lulus seleksi calon Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) awak kapal perikanan migran yang diterbitkan	-
PDI-Sertifikasi Profesi dan SDM	
001-Awak kapal perikanan yang disertifikasi	500.000
002-Petugas yang tersertifikasi di bidang kapal perikanan	1.250.000
QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
001-Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha	476.563
QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	
001-Pelaku usaha yang difasilitasi penerapan prinsip HAM pada usaha perikanan	-
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	
002-Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan	15.276.822
003-Sarana penangkapan ikan yang tersalurkan	26.700.000
2338-Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	
ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Rekomendasi kebijakan/perencanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang disusun	1.800.000
BGA-Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	
001-Pelabuhan perikanan yang dibina tata kelola dan operasionalnya sesuai standar	2.000.000
002-Pelabuhan Perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	27.312.383
004-Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya	1.000.000
FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	
001-Pemerintah daerah yang difasilitasi dan dibina tata kelola dan operasional pelabuhan perikanannya	-
PDI-Sertifikasi Profesi dan SDM	
001-Syahbandar dan Petugas Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya	1.500.000
002-Petugas mutu dan sertifikasi CPIB di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya	113.600
QGA-Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	
001-Pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar	550.000
002-Pelabuhan Perikanan yang dikelola pendataannya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	22.025.605
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	
001-Sarana penunjang pemungutan PNPB Perikanan Tangkap yang disediakan	-
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
001-Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan PP Perintis yang ditingkatkan fasillitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	-
003-Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM I	336.000.000
004-Pelabuhan Perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan - <i>Eco Fishing Port</i>	263.692.000
005-Pelabuhan Perikanan yang ditingkatkan prasarananya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	-
006-Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM II	70.000.000
SCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Petugas Pelabuhan Perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka mendukung Penangkapan Ikan Terukur	-
2339-Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	
ACA-Perizinan Produk	
001-Izin berusaha sub sektor penangkapan/pengangkutan ikan yang diterbitkan	1.175.000
BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
001-Nelayan yang difasilitasi perlindungannya	-
FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	
001-Provinsi yang difasilitasi tata kelola perizinan perikanan tangkap (TP)	1.100.000
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Rekomendasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur yang Dilaksanakan	4.000.000
PCA-Perizinan Produk	
001-Izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan	475.000
QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
001-Bidang tanah nelayan yang difasilitasi sertifikatnya	600.000
002-Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya	1.000.000
003-Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	1.000.000
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
001-Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya	1.000.000
004-Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang meningkat kapasitas kelembagaannya (Korporasi)	500.000
QEH-Bantuan Kelompok Masyarakat	
001-Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya (Kampung nelayan maju/Kalaju)	800.000
002-Bantuan Sarana Pengembangan Usaha Nelayan (Korporasi)	-
005-Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya - <i>Ocean for Prosperity Project</i> (Lautra)	1.000.000
QKA-Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat	

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
001-Bidang tanah nelayan yang diidentifikasi untuk difasilitasi sertifikatnya	400.000
002-Kelompok Usaha Bersama yang diidentifikasi untuk ditingkatkan kapasitas kelembagaannya	-
003-Nelayan yang diidentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan nelayan	1.000.000
UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	
001-Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi	3.500.000
2341-Pengelolaan Sumber Daya Ikan	
ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan SDI Perairan Darat	500.000
002-Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan SDI Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan laut lepas	500.000
003-Rekomendasi kebijakan alokasi SDI	500.000
BGA-Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	
001-Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat Yang Terbentuk	250.000
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data Log Book Penangkapan Ikan	400.000
002-Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan SDI Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan	500.000
003-Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data pemantauan Observer di atas kapal perikanan	2.000.000
QGA-Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	
001-Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	400.000
004-Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang terkelola kelembagaannya - <i>Ocean for Prosperity Project</i> (Lautra)	9.000.000
QKB-Pemantauan Produk	
001-Laporan Data Log Book penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	500.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	
002-Prasarana Pemulihan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan yang dibangun	-
WA-Program Dukungan Manajemen	
2342-Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	
CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
955-Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	8.000.000
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	
956-Layanan BMN	2.500.000

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
957-Layanan Hukum	2.000.000
958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	3.300.000
960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.000.000
962-Layanan Umum	800.000
963-Layanan Data dan Informasi	12.126.350
994-Layanan Perkantoran	366.744.447
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	
951-Layanan Sarana Internal	12.000.000
971-Layanan Prasarana Internal	8.000.000
EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	
954-Layanan Manajemen SDM	3.978.623
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	
952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	12.503.000
953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	8.296.265
955-Layanan Manajemen Keuangan	9.935.480
974-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	700.000
04-Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
7021-Pengelolaan Budi Daya Rumput Laut	
ACA-Perizinan Produk	
001-Rekomendasi teknis untuk perizinan usaha perikanan budi daya	
BAB-Pelayanan Publik kepada lembaga	
002-Unit Budidaya yang dibina penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	14.000
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut	1.000.000
QED-Bantuan Tanaman	
002-Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat	2.625.000
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	
001-Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat	9.350.000
002-Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - <i>'Ocean for Prosperity – Infrastructure for Coral Reef Areas</i>	10.000.000
003-Klaster Rumput Laut Berbasis Kawasan yang dibangun bagi masyarakat	-

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
7022-Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau	
BAB-Pelayanan Publik kepada lembaga	
001-Unit Pembenihan Ikan yang dibina penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)	76.928
002-Unit Budi daya yang dibina penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	185.000
003-Unit Produsen Pakan dan Obat yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan yang Baik	102.500
BJC-Penyidikan dan Pengujian Penyakit	
U01-Sampel Nutrisi Pakan Ikan Air Payau	34.385
U01-Sampel Residu Ikan Air Payau Layanan UPT	224.808
U02-Sampel Kualitas Air Ikan Air Payau Layanan UPT	751.355
U02-Sampel Obat Ikan Ikan Air Payau	17.226
U03-Sampel Mutu Pakan Ikan Air Payau	29.400
U03-Sampel Patologi Ikan Air Payau Layanan UPT	117.612
U04-Sampel Mikrobiologi Ikan Air Payau Layanan UPT	375.360
U05-Sampel Biologi Molekuler Ikan Air Payau Layanan UPT	661.500
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau	1.000.000
QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
001-Rekomendasi bidang lahan budi daya ikan air payau yang akan disertifikasi	-
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	
001-Sarana budi daya ikan air payau yang disalurkan ke masyarakat	-
QEL-Bantuan Hewan	
U02-Calon Induk Unggul Udang yang disalurkan ke masyarakat	979.232
U03-Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat	19.396
U07-Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat	726.344
U08-Benih Udang yang disalurkan ke masyarakat	2.083.068
QJC-Penyidikan dan Pengujian Penyakit	
001-Sampel Monitoring Residu Ikan Air Payau yang diuji	625.000
002-Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang diuji	420.000
U03-Sampel Surveillance Resistensi Antimikroba Ikan Air Payau (AMU/AMR) yang diuji	137.511
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang diproduksi	560.101

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
002-Calon Induk Unggul Udang yang diproduksi	7.832.940
004-Pakan Ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)	1.230.876
005-Benih Ikan Air Payau yang Diproduksi	676.413
006-Benih Udang yang Diproduksi	1.793.520
007-Ikan Konsumsi Hasil Budi Daya yang Diproduksi	8.504.189
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Klaster kawasan Revitalisasi Tambak Udang dan Bandeng	-
002-Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP)	6.250.000
003-Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture (IISAP)	400.000.000
004-Prasarana produksi perikanan budi daya di UPT	-
006-Budi Daya Udang Terintegrasi - ISF	-
008-Kluster Komoditas Unggulan Air Payau Berbasis Kawasan	-
7023-Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut	
AEF-Sosialisasi dan Diseminasi	
001-Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan budi daya	11.000.000
BAB-Pelayanan Publik kepada lembaga	
001-Unit Pembenihan Ikan yang dibina penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)	46.122
002-Unit Budidaya yang dibina penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	8.000
003-Unit Produsen Pakan dan Obat yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan yang Baik	102.500
BJC-Penyidikan dan Pengujian Penyakit	
U01-Sampel Nutrisi Pakan Ikan Air Laut	8.993
U01-Sampel Residu Ikan Air Laut Layanan UPT	102.986
U02-Sampel Kualitas Air Ikan Air Laut Layanan UPT	224.884
U03-Sampel Patologi Ikan Air Laut Layanan UPT	52.272
U04-Sampel Mikrobiologi Ikan Air Laut Layanan UPT	178.848
U05-Sampel Biologi Molekuler Ikan Air Laut Layanan UPT	192.080
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut	1.000.000
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	
001-Sarana budi daya ikan laut yang disalurkan ke masyarakat	4.500.000
QEL-Bantuan Hewan	

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
U04-Calon Induk Unggul Kepiting yang disalurkan ke masyarakat	-
U05-Calon Induk Unggul Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat	-
U09-Benih Kepiting yang disalurkan ke masyarakat	174.574
U10-Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat	10.646.932
QJC-Penyidikan dan Pengujian Penyakit	
001-Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut yang diuji	140.000
U02-Sampel Surveillance Resistensi Antimikroba Ikan Air Laut (AMU/AMR) yang diuji	68.625
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Calon Induk Unggul Kepiting yang diproduksi	13.317
002-Calon Induk Unggul Ikan Laut yang diproduksi	2.710.048
003-Pakan Ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)	181.900
004-Benih Kepiting yang diproduksi	170.811
005-Benih Ikan Laut yang diproduksi	990.706
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Kluster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan	10.000.000
7024-Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar	
ACA-Perizinan Produk	
001-Pakan dan Obat Ikan yang diregistrasi	300.000
BAB-Pelayanan Publik kepada lembaga	
001-Unit Pembenihan Ikan yang dibina penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)	376.950
002-Unit Budidaya yang dibina penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	293.000
003-Unit Produsen Pakan dan Obat yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan yang Baik	182.500
BJC-Penyidikan dan Pengujian Penyakit	
U01-Sampel Nutrisi Pakan Ikan Air Tawar	37.103
U01-Sampel Residu Ikan Air Tawar Layanan UPT	210.213
U02-Sampel Kualitas Air Ikan Air Tawar Layanan UPT	400.633
U02-Sampel Obat Ikan Ikan Air Tawar	17.232
U03-Sampel Mutu Pakan Ikan Air Tawar	48.026
U03-Sampel Patologi Ikan Air Tawar Layanan UPT	52.773
U04-Sampel Mikrobiologi Ikan Air Tawar Layanan UPT	248.257
U05-Sampel Biologi Molekuler Ikan Air Tawar Layanan UPT	241.251

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Tawar	1.000.000
QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
001-Rekomendasi bidang lahan budi daya ikan air tawar yang akan disertifikasi	-
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	
001-Sarana Budi Daya Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	41.950.000
002-Kampung Perikanan Budi Daya yang dikembangkan	-
QEL-Bantuan Hewan	
U01-Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	1.961.372
U06-Benih Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	9.271.165
QJC-Penyidikan dan Pengujian Penyakit	
001-Sampel Monitoring Residu Ikan Air Tawar yang diuji	375.000
002-Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Tawar yang diuji	140.000
U03-Sampel Surveillance Resistensi Antimikroba Ikan Air Tawar (AMU/AMR) yang diuji	96.075
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang Diproduksi	6.389.459
002-Pakan Ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)	1.921.700
003-Benih Ikan Air Tawar yang Diproduksi	2.220.550
004-Peralatan Laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan	-
005-Toward Sustainable and Conversion-Free Aquaculture in Southeast Asia (TOSCA) - Hibah GEF	12.964.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Prasarana produksi perikanan budi daya ikan air tawar	-
002-Toward Sustainable and Conversion-Free Aquaculture in Southeast Asia	-
WA-Program Dukungan Manajemen	
2348-Dukungan Manajemen Internal Lingkup DJPB	
AEC-Layanan Kerjasama	
001-Kerja Sama Bidang Perikanan Budi Daya	1.519.013
CAN-Sarana Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi	
001-Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1.775.000
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	
956-Layanan BMN	600.000

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
957-Layanan Hukum	700.000
958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	3.745.871
960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	800.000
962-Layanan Umum	4.193.166
963-Layanan Data dan Informasi	4.300.000
994-Layanan Perkantoran	315.519.520
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	
951-Layanan Sarana Internal	300.000
EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	
001-Layanan Manajemen SDM	3.934.033
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	
952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6.786.186
953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4.865.371
955-Layanan Manajemen Keuangan	6.806.973
974-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	380.000
05-Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP	
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2350-Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	
ABW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	
001-Rekomendasi Kebijakan Bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	300.000
AFA-Norma, Standard, Prosedur, Kriteria	
001-NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	220.000
BKB-Pemantauan Produk	
001- Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dipantau	1.183.000
CAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan	900.000
CBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pendukung yang dibangun	-
FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
001-Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Operasi Armada	547.000
QHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	
001-Operasi Kapal Pengawas	310.528.588
002-Operasi Pesawat Patroli	40.000.000
003-Operasi <i>Speedboat</i> Pengawas	9.828.000
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Kapal pengawas	-
002- <i>Speedboat</i> pengawas	-
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Prasarana Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dibangun	8.968.000
RCG-OM Sarana Bidang Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
001-Armada Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dirawat	58.849.447
2351-Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan	
ABW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	
001-Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan	264.000
AEA-Koordinasi	
001-Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan	2.754.000
AFA-Norma, Standard, Kriteria, Prosedur	
001-NSPK bidang Penanganan Pelanggaran	194.000
BCB-Perkara Hukum Lembaga	
001-Perkara hukum terkait Ditjen PSDKP yang diselesaikan	300.000
BCE-Penanganan Perkara	
001-Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan sanksi pidana	2.000.000
002-Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif	2.330.000
003-Sengketa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditangani	1.098.000
BKB-Pemantauan Produk	
001-Penanganan Perkara TPKP yang dipantau	1.650.000
2352-Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
ABW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	
001-Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Kelautan	200.000
002-Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Perikanan	322.000

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
ACA-Perizinan Produk	
001-Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	1.511.000
AEA-Kordinasi	
001-Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan	1.732.000
002-Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya perikanan	1.559.150
AFA-Norma, Standard, Kriteria, Prosedur	
001-NSPK Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	198.000
002-NSPK Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	355.000
BHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	
001-Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	1.995.952
002-Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan	679.690
BII-Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan	
001-Audit pemanfaatan ruang laut yang dilaporkan	150.000
002-Pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan	400.000
BKB-Pemantauan Produk	
001-Hasil pengawasan kepatuhan usaha sektor kelautan yang dipantau	2.998.988
002-Hasil pengawasan kepatuhan usaha sektor perikanan yang dipantau	1.595.000
FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	
001-Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Kelautan	454.508
002-Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Perikanan	2.216.000
QIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Unit Usaha)	
001-Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	7.654.000
002-Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	9.532.000
RDS-OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
001-Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional	3.811.000
2353-Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	
BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
001-Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan	242.000
002-Nelayan yang difasilitasi pemulangnya	264.000
003-Nelayan yang diberikan pemahaman untuk tidak melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin	264.000
004-Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan	270.000

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
BKB-Pemantauan Produk	
001-Pemantauan hasil pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	330.500
BMB-Komunikasi Publik	
001-Komunikasi publik bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	663.987
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
001-Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	8.900.000
WA-Program Dukungan Manajemen	
2355-Dukungan Manajemen Internal lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	
AEC-Kerja sama	
001-Kerja sama Bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2.600.000
CAN-Sarana Bidang Teknologi dan Informasi	
001-Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1.800.000
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	
956-Layanan BMN	1.112.000
957-Layanan Hukum	790.000
958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.374.000
960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	869.000
962-Layanan Umum	10.533.584
963-Layanan Data dan Informasi	1.185.000
969-Layanan Bantuan Hukum	42.976
994-Layanan Perkantoran	280.009.193
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	
951-Layanan Sarana Internal	4.280.000
971-Layanan Prasarana Internal	1.200.000
EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	
954-Layanan Manajemen SDM	3.425.000
996-Layanan Pendidikan dan Pelatihan	6.670.000
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	
952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6.555.200
953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2.450.000
955-Layanan Manajemen Keuangan	5.760.000

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
961-Layanan Reformasi Kinerja	5.000.000
974-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.240.000
06-Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing PKP	
EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
2357-Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	
BDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	
001-Pelaku Usaha Pemasaran yang dibina	810.000
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
003-Kertas Posisi Runding Penyelesaian Hambatan Ekspor dan Perluasan Akses Pasar Luar Negeri	515.950
PDA-Standarisasi Produk	
001-Produk Kelautan Perikanan yang dikurasi	540.000
PEE-Kemitraan	
001-Kesepakatan Pemasaran Produk Perikanan di Dalam negeri	200.000
002-Kerjasama pemasaran rumput laut	150.000
PEH-Promosi	
001-Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	31.874.000
002-Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri oleh Daerah	3.376.000
003-Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional	900.000
004-Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri	1.200.000
005-Promosi produk rumput Laut Skala Internasional	800.000
QDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri	
001-Eksportir Kelautan Perikanan baru yang ditumbuhkan	400.000
002-Penumbuhan Eksportir Produk Rumput Laut	300.000
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	
001-Peralatan Pemasaran	6.979.500
003-Kendaraan Pemasaran Ikan	-
QMA-Data dan Informasi Publik	
001-Profil Pasar Ekspor Hasil Kelautan Perikanan	400.000
002-Profil Pasar Dalam Negeri Hasil Kelautan Perikanan	400.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	
001-Prasarana Pemasaran Kelautan dan Perikanan	38.000.000

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
UAB-Sistem Informasi Pemerintahan	
001-Bursa Ikan	-
2358-Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	
ADA-Standardisasi Produk	
001-Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP	705.000
BMA-Data dan Informasi Publik	
002-Profilling Industri Pengolahan Hasil Perikanan	400.000
QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	
001-Pelaku Usaha yang difasilitasi pembinaan diversifikasi produk bernilai tambah	6.053.500
QDI-Falitasi dan pembinaan Industri	
001-Industri Pengolahan Produk KP yang dibina	2.650.050
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	
001-Sarana sistem rantai dingin hasil KP	2.046.000
002-Sarana Pengolahan Hasil KP	4.974.500
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	
001-Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang dibangun	-
5279-Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	
ADA-Standardisasi Produk	
001-Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil kelautan dan perikanan	122.153
002-Produk Kelautan dan Perikanan yang Dinilai Kesesuaiannya	250.000
003-Produk Kelautan dan Perikanan yang Diuji	525.000
AEF-Sosialisasi dan Diseminasi	
001-Masyarakat yang menerima diseminasi Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	300.000
DDA-Penelitian dan Pengembangan Produk	
001-Produk Kelautan dan Perikanan Bernilai Tambah yang Diterapkan	300.000
QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	
001-UMKM Kelautan Perikanan yang Difasilitasi dalam Inkubasi Bisnis	450.000
QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	
001-Badan Usaha yang difasilitasi Kemitraan Penyimpanan Produk	360.979
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku	1.991.944

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	
001-Prasarana Pendukung Operasional Gudang beku	1.000.000
7025-Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	
ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Rantai Pasok	400.000
AEE-Kemitraan	
001-Kemitraan dalam rangka pengadaan, distribusi dan penyimpanan	1.125.000
BDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	
001-Pelaku Usaha yang dibina dalam rangka penguatan sistem logistik	481.950
BMA-Data dan Informasi Publik	
051-Profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil KP	600.000
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
004-Rekomendasi kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas	500.000
QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	
001-Pelaku Usaha yang menerapkan Sistem Telusur Logistik Ikan Nasional (STELINA)	450.000
QEG-Bantuan Perlatan/Sarana	
001-Sarana Penyimpanan Produk KP	2.300.000
002-Sarana Distribusi Logistik Produk KP	-
RBQ -Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	
001-Gudang Beku dan Kelengkapannya	-
7026-Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	
ACD-Perizinan Lembaga	
001-Pelaku usaha yang difasilitasi perizinan berusaha sub sektor pengolahan dan pemasaran	375.000
PEH-Promosi	
001-Promosi usaha dan investasi KP	1.400.000
QDB- Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	
001- Lembaga usaha KP yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan usaha	440.000
QDG- Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	
001-UMKM KP yang difasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan usaha	654.000
002-Wirausaha KP yang ditumbuhkan dan/atau dibina	6.150.000
RBO-Prasarana Pengembangan Kawasan	

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
001-Prasarana Kawasan Hilirisasi KP	3.600.000
WA-Program Dukungan Manajemen	
2361-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DJPDSPKP	
AEC-Kerja sama	
001-Layanan Kerja Sama	898.000
CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
051-Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Ditjen PDSPKP yang disediakan	-
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	
957-Layanan Hukum	1.200.000
958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.559.000
960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	800.000
962-Layanan Umum	3.991.043
963-Layanan Data dan Informasi	2.000.000
969-Layanan Bantuan Hukum	210.000
994-Layanan Perkantoran	106.621.051
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	
951-Layanan Sarana dan Prasana Internal	-
EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	
954-Layanan Manajemen SDM	800.000
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	
952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4.800.000
953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.110.000
955-Layanan Manajemen Keuangan	1.630.000
956-Layanan Barang Milik Negera	1.390.000
961-Layanan Reformasi Kinerja	800.000
07-Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	
FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	
2362-Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	
PBW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	
001-Rekomendasi Pengelolaan Konservasi Ekosistem	805.000
002-Rekomendasi Pengelolaan Biota Perairan	-

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
003-Rekomendasi Peningkatan Luas Kawasan Konservasi	-
004-Rekomendasi Usulan Penetapan Kawasan Konservasi	-
PCA-Perizinan Produk	
001-Perizinan Produk Konservasi Ekosistem	-
002-Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan	6.960.084
PEE-Kemitraan	
001-Kerjasama, Jejaring dan Kemitraan Konservasi Ekosistem	500.000
PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	
001-Dokumen NSPK Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	550.296
QEH-Bantuan Kelompok Masyarakat	
001-Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi	-
QMA-Data dan Informasi Publik	
001-Data dan Informasi Konservasi Ekosistem	3.331.218
002-Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan	4.480.000
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Ekosistem	800.000
002-Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Biota Perairan	
REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	
001-Kawasan Konservasi Perairan yang Operasional (kumulatif)	890.000
002-Oceans for Prosperity Project - Lautra	283.744.000
003-Kawasan Konservasi yang dihitung Neraca Sumberdaya	-
REB-Konservasi Jenis/Spesies	
001-Konservasi Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau <i>Appendix</i> CITES (kumulatif)	4.072.690
002-Keanekaragaman Hayati Perairan yang dikelola pemanfaatannya secara Berkelanjutan	-
SCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya	500.000
002-Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Kompetensinya	800.000
UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	
001-Pemerintah daerah yang difasilitasi penyusunan usulan Penetapan Kawasan Konservasi	
4346-Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
PBW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
001-Rekomendasi Pengendalian Perubahan Iklim	-
PEE-Kemitraan	
001-Jejarang dan Kemitraan Pengendalian Perubahan Iklim	-
PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	
001-Dokumen NSPK Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	557.680
002-Dokumen NSPK Pengendalian Perubahan Iklim	-
003-Dokumen NSPK Mitigasi Bencana	-
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
001-Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran	141.680
002-Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap mitigasi Bencana	985.830
003-Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap Dampak Perubahan Iklim	
QEH-Bantuan Kelompok Masyarakat	
001-Bantuan Pengembangan Kawasan Karbon Biru	
002-Bantuan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh	
003-Bantuan Pengembangan Desa Pesisir Bersih	701.870
004-Bantuan Pusat Rehabilitasi dan Pembelajaran Ekosistem Pesisir	
RBH-Prasarana Bidang Pengendalian Bencana	
001-Prasarana Kawasan Pesisir Tangguh	
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	
001-Prasarana Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
002-Prasarana penanggulangan sampah di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	-
REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	
001-Kawasan mangrove yang direhabilitasi	398.770
002-Vegetasi pantai yang ditanami untuk mitigasi bencana	
003-Kawasan padang lamun yang direhabilitasi	
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2363-Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	
ABW-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Rekomendasi Kebijakan/Perizinan Pemanfaatan pesisir dan laut untuk bangunan dan instalasi di laut	2.220.650
002-Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perairan	3.585.000
AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
001-Dokumen NSPK Jasa Kelautan	233.841
PBW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	
001-Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Reklamasi	2.000.000
002-Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut	2.000.000
003-Rekomendasi Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam	4.000.000
004-Rekomendasi kebijakan pengelolaan wisata bahari dan BMKT	4.200.000
005-Rekomendasi kebijakan pengelolaan sedimentasi di laut	3.000.000
006-Rekomendasi Kebijakan Berusaha Jasa Kelautan	3.500.000
PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	
001-Dokumen NSPK Jasa Kelautan	8.550.000
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
001-Korporasi Petambak Garam	
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	
001-Sarana Wisata Bahari	
002-Sarana Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)	
003-Sarana niaga garam rakyat	4.000.000
004-Sarana produksi biofarmakologi	
RAI-Sarana Pengembangan Kawasan	
001-Lahan Garam yang difasilitasi	
SCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Pengelola Wisata Bahari yang Ditingkatkan Kompetensinya	1.000.000
002-Masyarakat Pemanfaat Air Laut dan Biofarmakologi yang Ditingkatkan Kompetensinya	-
2365-Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
PBW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	
001-Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	8.600.000
002-Rekomendasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	1.599.999
PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	
001-Dokumen NSPK Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil	200.000
002-Dokumen NSPK Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	381.938
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
001-Masyarakat hukum adat di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dilindungi dan dikuatkan kapasitasnya	900.000

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
003-Masyarakat lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang difasilitasi dan dilindungi pemanfaatan ruang lautnya	1.200.000
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	
001-Bantuan Ekonomi Produktif Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	7.000.000
QMA-Data dan Informasi Publik	
001-Dokumentasi Data dan Informasi Potensi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	2.000.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Prasarana/Infrastruktur di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	2.500.000
2366-Penataan Ruang Laut	
PBT-Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	
007-Rekomendasi kebijakan pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut)	8.200.000
008-Rekomendasi kebijakan verifikasi KKPRL di daerah	3.900.000
009-Rekomendasi kebijakan verifikasi KKPRL yang beresiko rendah	6.000.000
010-Rekomendasi Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang laut	2.300.000
PBW-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Rekomendasi kebijakan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	3.000.000
002-Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSN yang akan diintegrasikan kedalam RTR KSN	3.250.000
003-Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSNT yang berupa PPKT diintegrasikan ke dalam RTR KSN	3.500.000
007-Rekomendasi Integrasi RTRL dengan RTRWN	1.250.000
008-Rekomendasi kebijakan KSNT Non PPKT yang Memiliki Rencana Zonasi KSNT Non PPKT yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	2.000.000
009-Rekomendasi kebijakan wilayah laut yang memiliki dokumen perencanaan pengelolaan sedimentasi	3.100.000
PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	
001-Dokumen NSPK Perencanaan Ruang Laut	1.440.000
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	1.200.000
002-Pembangunan Sistem Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	
UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	
001-Pemerintah daerah yang difasilitasi integrasi RZWP3K dengan RTRW Provinsi	3.400.000
002-Pemerintah Daerah yang dibina untuk pengelolaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	1.100.000
003-Pemerintah daerah yang difasilitasi pengelolaan sedimentasi di laut	1.000.000
WA-Program Dukungan Manajemen	

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
2367-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	
AEC-Kerjasama	
051-Layanan Kerjasama	2.569.000
CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
001-Perangkat Pengolah Data dan Informasi	
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	
956-Layanan BMN	1.154.074
957-Layanan Hukum	3.607.000
958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.743.394
960-Layanan Manajemen Organisasi	2.966.345
962-Layanan Umum	5.456.506
963-Layanan Data dan Informasi	1.273.180
994-Layanan Perkantoran	174.137.173
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	
951-Layanan Sarana Internal	
971-Layanan Prasarana Internal	-
EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	
954-Layanan Manajemen SDM	2.385.332
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	
952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5.017.740
953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2.263.534
955-Layanan Manajemen Keuangan	3.062.765
961-Layanan Reformasi Kinerja	426.576
12-Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	
DL-Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	
2375-Pelatihan Kelautan dan Perikanan	
ABW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	
122-Inovasi yang Diterapkan untuk Pelatihan Kelautan dan Perikanan	100.000
ADF-Sertifikasi Lembaga	
141-Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan	713.500
AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
161-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pelatihan Kelautan dan Perikanan	82.500
DCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	
431-Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi	435.600
QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	
641-Fasilitasi dan Pembinaan Desa Perikanan Cerdas/ <i>Smart Fisheries Village</i> (SFV)	-
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
001-Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan	-
002-Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan	-
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
711-Peralatan dan Mesin Pelatihan Kelautan dan Perikanan	1.236.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
002-Gedung, Bangunan dan Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-
721-Gedung, Bangunan dan Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4.972.121
SCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	
831-Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih	32.685.702
2376-Pendidikan Kelautan dan Perikanan	
ABW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	
121-Kajian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan	4.210.000
AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	
161-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pendidikan Kelautan dan Perikanan	300.000
BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	
241-Fasilitasi dan Pembinaan Desa Perikanan Cerdas/ <i>Smart Fisheries Village</i> (SFV)	-
PDE-Akreditasi Lembaga	
541-Akreditasi Lembaga Pendidikan Kelautan dan Perikanan	1.920.000
PDI-Sertifikasi Profesi dan SDM	
545-Sertifikasi Profesi dan SDM Pendidikan Kelautan dan Perikanan	1.500.000
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
643-Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Penerapan Ilmu Pengetahuan Atau Teknologi Pendidikan Tinggi	1.348.000
QGC-Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan	
671-Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan Kelautan dan Perikanan	17.255.600
RAA-Sarana Bidang Pendidikan	

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
711-Peralatan dan Mesin Pendidikan Kelautan dan Perikanan	9.666.360
RAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
715-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	450.000
RBI-Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	
721-Gedung, Bangunan dan Prasarana Pendidikan Menengah yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200.000
RBJ-Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	
725-Gedung, Bangunan dan Prasarana Pendidikan Tinggi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	18.101.453
SAC-Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan	
811-Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	133.846.232
7020-Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	
ABW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	
126-Inovasi yang diterapkan untuk Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	38.000
128-Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	38.000
AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	
166-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Penyuluhan KP	200.000
BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	
246-Fasilitasi dan Pembinaan Desa Perikanan Cerdas/ <i>Smart Fisheries Village</i> (SFV)	-
DCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	
436-Penyuluh Perikanan yang bersertifikat kompetensi	50.000
QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	
646-Fasilitasi dan Pembinaan Desa Perikanan Cerdas/ <i>Smart Fisheries Village</i> (SFV)	500.000
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
646-Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan	27.000.000
648-Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan/Penerapan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi	1.791.405
QKA-Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat	
696-Pemantauan Sosial Ekonomi Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Lokasi Program Prioritas KKP	37.682
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
716-Peralatan dan Mesin Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	250.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
726-Gedung, Bangunan dan Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	500.000

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
WA-Program Dukungan Manajemen	
2378-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	
AEC-Kerja sama	
964-Layanan Kerja Sama	2.500.000
BMA-Informasi dan Komunikasi Publik	
291-Data dan Informasi Publik Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	-
CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
311-Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	-
CBT-Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
321-Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	-
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	
956-Layanan BMN	927.231
957-Layanan Hukum	478.900
958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2.173.695
959-Layanan Protokoler	-
960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	600.000
962-Layanan Umum	5.412.958
963-Layanan Data dan Informasi	811.012
969-Layanan Bantuan Hukum	21.100
994-Layanan Perkantoran	1.012.638.604
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	
951-Layanan Sarana Internal	7.751.059
971-Layanan Prasarana Internal	5.000.000
EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	
954-Layanan Manajemen SDM	827.137
968-Layanan Pendidikan Kedinasan	-
996-Layanan Pendidikan dan Pelatihan	-
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3.998.380
953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.930.020
955-Layanan Manajemen Keuangan	3.147.917
961-Layanan Reformasi Kinerja	-
965-Layanan Audit Internal	-
974-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	760.675
FAB-Sistem Informasi Pemerintahan	
461-Sistem Informasi Pemerintahan Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	150.000
4345-Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan	
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	
951-Layanan Sarana Internal	-
971-Layanan Prasarana Internal	-
EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	
996-Layanan Pendidikan dan Pelatihan	12.139.360
13-Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	
EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
3989-Pengendalian dan Pengawasn Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	
AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	
001-Kebijakan Teknis Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer	300.000
002-Kebijakan Teknis Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen	300.000
BIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk	
001-Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya	700.000
PDC-Sertifikasi Produk	
001-Sertifikat mutu produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen	2.100.000
002-Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	3.900.000
PDF-Sertifikasi Lembaga	
001-Sertifikat mutu lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer	2.000.000
002-Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	3.750.000
QIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk	
001-Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya	750.000

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
QIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	
002-UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	1.000.000
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan perikanan	
001-Sarana Pengujian Mutu	500.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan perikanan	
001-Prasarana Pengujian Mutu	500.000
7010-Manajemen Mutu	
ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	600.000
AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	
001-NSPK standarisasi sistem Jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan	200.000
DCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan	500.000
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	3.500.000
002-Rekomendasi Kebijakan Metode/Parameter uji yang dihasilkan laboratorium acuan	2.100.351
PDD-Standarisasi Lembaga	
001-Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	1.400.000
002-Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium	1.400.000
003-Unit kerja yang menerapkan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	700.000
QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
001-Masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	6.875.000
QIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk	
001-Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	500.000
WA-Program Dukungan Manajemen	
3987-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	
CAN-Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
001-Alat Pengolah Data dan Komunikasi Lingkup BPPMHKP	200.000

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	
956-Layanan BMN	500.000
957-Layanan Hukum	300.000
958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	550.000
960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	550.000
962-Layanan Umum	9.600.000
963-Layanan Data dan Informasi	500.000
994-Layanan Perkantoran	286.930.430
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	
951-Layanan Sarana Internal	200.000
971-Layanan Prasarana Internal	300.000
EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	
954-Layanan Manajemen SDM	511.016
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	
952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6.000.000
953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	532.939
955-Layanan Manajemen Keuangan	2.100.000
974-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	300.000

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Effin Martiana

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 91 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2025

**RINCIAN PRIORITAS NASIONAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025**

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
Prioritas Nasional 2 - memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian Bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	
01 – Sekretariat Jenderal	
WA – Program Dukungan Manajemen	
2322 – Legislasi, Litigasi dan Kerjasama	
PEC – Kerjasama	
001 – Kerjasama Internasional bidang Kelautan dan Perikanan	5.500.000
2329 - Pengelolaan Data dan Informasi	
QMA – Data dan Informasi Publik	
001 - Layanan Data Kelautan dan Perikanan	4.600.000
RAN - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
001 - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	10.000.000
002 - Sarana Data Citra Satelit Radar	606.731
RCL - OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
001 - OM Sarana Data Citra Satelit Radar	4.459.766
03 - Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	
HB - Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2337 - Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	
PCA - Perizinan Produk	

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
001-Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan	261.350
002-Dokumen bukti lulus seleksi calon Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) awak kapal perikanan migran yang diterbitkan	-
PDI-Sertifikasi Profesi dan SDM	
001-Awak kapal perikanan yang disertifikasi	500.000
002-Petugas yang tersertifikasi di bidang kapal perikanan	1.250.000
QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
001-Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha	476.563
QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	
001-Pelaku usaha yang difasilitasi penerapan prinsip HAM pada usaha perikanan	-
QEG-Bantuan Peralatan / Sarana	
002-Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan	15.276.822
003-Sarana penangkapan ikan yang tersalurkan	26.700.000
2328- 2338-Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	
2338-Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	
001-Syahbandar dan Petugas Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya	1.500.000
002-Petugas mutu dan sertifikasi CPIB di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya	113.600
QGA-Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	
001-Pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar	550.000
002-Pelabuhan Perikanan yang dikelola pendataannya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	22.025.605
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	
001-Sarana penunjang pemungutan PNPB Perikanan Tangkap yang disediakan	-
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	
001-Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan PP Perintis yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	-
003-Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM I	336.000.000
004-Pelabuhan Perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan - <i>Eco Fishing Port</i>	263.692.000
005-Pelabuhan Perikanan yang ditingkatkan prasarananya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	-
006-Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM II	70.000.000
SCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
001-Petugas Pelabuhan Perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka mendukung Penangkapan Ikan Terukur	-
2339-Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Rekomendasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur yang Dilaksanakan	4.000.000
PCA-Perizinan Produk	
001-Izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan	475.000
QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
001-Bidang tanah nelayan yang difasilitasi sertifikatnya	600.000
002-Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya	1.000.000
003-Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	1.000.000
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
001-Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya	1.000.000
004-Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang meningkat kapasitas kelembagaannya (Korporasi)	500.000
QEH-Bantuan Kelompok Masyarakat	
001-Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya (Kampung nelayan maju/Kalaju)	800.000
002-Bantuan Sarana Pengembangan Usaha Nelayan (Korporasi)	-
005-Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya - <i>Ocean for Prosperity Project</i> (Lautra)	1.000.000
QKA-Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat	
001-Bidang tanah nelayan yang diidentifikasi untuk difasilitasi sertifikatnya	400.000
002-Kelompok Usaha Bersama yang diidentifikasi untuk ditingkatkan kapasitas kelembagaannya	-
003-Nelayan yang diidentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan nelayan	1.000.000
UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	
001-Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi	3.500.000
2341-Pengelolaan Sumber Daya Ikan	
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data Log Book Penangkapan Ikan	400.000
002-Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan SDI Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan	500.000
003-Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data pemantauan Observer di atas kapal perikanan	2.000.000

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
QGA-Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	
001-Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	400.000
004-Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang terkelola kelembagaanya - <i>Ocean for Prosperity Project</i> (Lautra)	9.000.000
QKB-Pemantauan Produk	
001-Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	500.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	
002-Prasarana Pemulihan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan yang dibangun	-
04-Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
7022-Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau	
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau	1.000.000
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	
001-Sarana budi daya ikan laut yang disalurkan ke masyarakat	4.500.000
QEL-Bantuan Hewan	
U04-Calon Induk Unggul Kepiting yang disalurkan ke masyarakat	-
U05-Calon Induk Unggul Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat	-
U09-Benih Kepiting yang disalurkan ke masyarakat	174.574
U10-Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat	10.646.932
QJC-Penyidikan dan Pengujian Penyakit	
001-Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut yang diuji	140.000
U02-Sampel <i>Surveillance</i> Resistensi Antimikroba Ikan Air Laut (AMU/AMR) yang diuji	68.625
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Calon Induk Unggul Kepiting yang diproduksi	13.317
002-Calon Induk Unggul Ikan Laut yang diproduksi	2.710.048
003-Pakan Ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)	181.900
004-Benih Kepiting yang diproduksi	170.811

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
005-Benih Ikan Laut yang diproduksi	990.706
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Kluster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan	10.000.000
7024-Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar	
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Tawar	1.000.000
QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
001-Rekomendasi bidang lahan budi daya ikan air tawar yang akan disertifikasi	-
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	
001-Sarana Budi Daya Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	41.950.000
002-Kampung Perikanan Budi Daya yang dikembangkan	-
QEL-Bantuan Hewan	
U01-Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	1.961.372
U06-Benih Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	9.271.165
QJC-Penyidikan dan Pengujian Penyakit	
001-Sampel Monitoring Residu Ikan Air Tawar yang diuji	375.000
002-Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Tawar yang diuji	140.000
U03-Sampel <i>Surveillance</i> Resistensi Antimikroba Ikan Air Tawar (AMU/AMR) yang diuji	96.075
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang Diproduksi	6.389.459
002-Pakan Ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)	1.921.700
003-Benih Ikan Air Tawar yang Diproduksi	2.220.550
004-Peralatan Laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan	-
005-Toward Sustainable and Conversion-Free Aquaculture in Southeast Asia (TOSCA) - Hibah GEF	12.964.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Prasarana produksi perikanan budi daya ikan air tawar	-
002-Toward Sustainable and Conversion-Free Aquaculture in Southeast Asia	-
05-Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP	

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2350-Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	
QHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	
001-Operasi Kapal Pengawas	310.528.588
002-Operasi Pesawat Patroli	40.000.000
003-Operasi <i>Speedboat</i> Pengawas	9.828.000
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Kapal pengawas	-
002- <i>Speedboat</i> pengawas	-
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Prasarana Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dibangun	8.968.000
RCG-OM Sarana Bidang Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
001-Armada Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dirawat	58.849.447
2352-Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
QIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Unit Usaha)	
001-Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	7.654.000
002-Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	9.532.000
RDS-OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
001-Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional	3.811.000
2353-Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
001-Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	8.900.000
06-Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	
EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
2357-Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
003-Kertas Posisi Runding Penyelesaian Hambatan Ekspor dan Perluasan Akses Pasar Luar Negeri	515.950
PDA-Standarisasi Produk	

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
001-Produk Kelautan Perikanan yang dikurasi	540.000
PEE-Kemitraan	
001-Kesepakatan Pemasaran Produk Perikanan di Dalam negeri	200.000
PEH-Promosi	
001-Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	31.874.000
002-Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri oleh Daerah	3.376.000
003-Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional	900.000
004-Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri	1.200.000
QDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri	
001-Eksportir Kelautan Perikanan baru yang ditumbuhkan	300.000
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	
001-Peralatan Pemasaran	6.979.500
003-Kendaraan Pemasaran Ikan	-
QMA-Data dan Informasi Publik	
001-Profil Pasar Ekspor Hasil Kelautan Perikanan	400.000
002-Profil Pasar Dalam Negeri Hasil Kelautan Perikanan	400.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	
001-Prasarana Pemasaran Kelautan dan Perikanan	38.000.000
UAB-Sistem Informasi Pemerintahan	
001-Bursa Ikan	-
2358-Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	
QDG -Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	
001-Pelaku Usaha yang difasilitasi pembinaan diversifikasi produk bernilai tambah	6.053.500
QDI-Falitasi dan pembinaan Industri	
001-Industri Pengolahan Produk KP yang dibina	2.650.050
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	
001-Sarana sistem rantai dingin hasil KP	2.046.000
002-Sarana Pengolahan Hasil KP	4.974.500

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	
001-Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang dibangun	-
5279-Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	
QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	
001-UMKM Kelautan Perikanan yang Difasilitasi dalam Inkubasi Bisnis	450.000
QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	
001-Badan Usaha yang difasilitasi Kemitraan Penyimpanan Produk	360.979
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku yang disediakan	1.991.944
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	
001-Prasarana Pendukung Operasional Gudang beku	1.000.000
7025-Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
004-Rekomendasi kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas	500.000
QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	
001-Pelaku Usaha yang menerapkan Sistem Telusur Logistik Ikan Nasional (STELINA)	450.000
QEG-Bantuan Perlatan/Sarana	
001-Sarana Penyimpanan Produk KP	2.300.000
002-Sarana Distribusi Logistik Produk KP	-
RBQ -Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	
001-Gudang Beku dan Kelengkapannya	-
7026-Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	
PEH-Promosi	
001-Promosi usaha dan investasi KP	1.400.000
QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	
001-Lembaga usaha KP yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan usaha	440.000
QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	
001-UMKM KP yang difasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan usaha	654.000

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
002-Wirausaha KP yang ditumbuhkan dan/atau dibina	6.150.000
RBO-Prasarana Pengembangan Kawasan	
001-Prasarana Kawasan Hilirisasi KP	3.600.000
07-Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	
FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	
2362-Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	
PBW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	
001-Rekomendasi Pengelolaan Konservasi Ekosistem	805.000
002-Rekomendasi Pengelolaan Biota Perairan	-
003-Rekomendasi Peningkatan Luas Kawasan Konservasi	-
004-Rekomendasi Usulan Penetapan Kawasan Konservasi	-
PCA-Perizinan Produk	
001-Perizinan Produk Konservasi Ekosistem	-
002-Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan	6.960.084
PEE-Kemitraan	
001-Kerjasama, Jejaring dan Kemitraan Konservasi Ekosistem	500.000
PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	
001-Dokumen NSPK Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	550.296
QEH-Bantuan Kelompok Masyarakat	
001-Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi	-
QMA-Data dan Informasi Publik	
001-Data dan Informasi Konservasi Ekosistem	3.331.218
002-Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan	3.480.000
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Ekosistem	800.000
002-Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Biota Perairan	-
REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	
001-Kawasan Konservasi Perairan yang Operasional (kumulatif)	890.000

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
002-Oceans for Prosperity Project - Lautra	283.744.000
003-Kawasan Konservasi yang dihitung Neraca Sumberdaya	-
REB-Konservasi Jenis/Spesies	
001-Konservasi Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau <i>Appendix</i> CITES (kumulatif)	4.072.690
002-Keanekaragaman Hayati Perairan yang dikelola pemanfaatannya secara Berkelanjutan	-
SCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya	500.000
002-Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Kompetensinya	800.000
UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	
001-Pemerintah daerah yang difasilitasi penyusunan usulan Penetapan Kawasan Konservasi	-
4346-Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	
001-Dokumen NSPK Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	557.680
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
001-Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran	141.680
002-Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap mitigasi Bencana	985.830
003-Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap Dampak Perubahan Iklim	
QEH-Bantuan Kelompok Masyarakat	
001-Bantuan Pengembangan Kawasan Karbon Biru	-
003-Bantuan Pengembangan Desa Pesisir Bersih	701.870
004-Bantuan Pusat Rehabilitasi dan Pembelajaran Ekosistem Pesisir	-
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	
001-Prasarana Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-
REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	
001-Kawasan mangrove yang direhabilitasi	398.770
003-Kawasan padang lamun yang direhabilitasi	-
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2363-Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	
PBW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
001-Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Reklamasi	2.000.000
002-Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut	2.000.000
003-Rekomendasi Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam	4.000.000
004-Rekomendasi kebijakan pengelolaan wisata bahari dan BMKT	4.200.000
005-Rekomendasi kebijakan pengelolaan sedimentasi di laut	3.000.000
006-Rekomendasi Kebijakan Berusaha Jasa Kelautan	3.500.000
PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	
001-Dokumen NSPK Jasa Kelautan	8.550.000
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
001-Korporasi Petambak Garam	-
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	
001-Sarana Wisata Bahari	-
003-Sarana niaga garam rakyat	4.000.000
004-Sarana produksi biofarmakologi	-
RAI-Sarana Pengembangan Kawasan	
001-Lahan Garam yang difasilitasi	-
SCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Pengelola Wisata Bahari yang Ditingkatkan Kompetensinya	1.000.000
002-Masyarakat Pemanfaat Air Laut dan Biofarmakologi yang Ditingkatkan Kompetensinya	-
2365-Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
PBW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	
001-Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	8.600.000
002-Rekomendasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	1.599.999
PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	
001-Dokumen NSPK Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil	200.000
002-Dokumen NSPK Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	381.938
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
001-Masyarakat hukum adat di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dilindungi dan dikuatkan kapasitasnya	900.000

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
003-Masyarakat lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang difasilitasi dan dilindungi pemanfaatan ruang lautnya	1.200.000
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	
001-Bantuan Ekonomi Produktif Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	7.000.000
QMA-Data dan Informasi Publik	
001-Dokumentasi Data dan Informasi Potensi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	2.000.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Prasarana/Infrastruktur di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	2.500.000
2366-Penataan Ruang Laut	
PBT-Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	
007-Rekomendasi kebijakan pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	8.200.000
008-Rekomendasi kebijakan verifikasi KKPRL di daerah	3.900.000
009-Rekomendasi kebijakan verifikasi KKPRL yang beresiko rendah	6.000.000
010-Rekomendasi Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang laut	2.300.000
PBW-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Rekomendasi kebijakan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	3.000.000
002-Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSN yang akan diintegrasikan kedalam RTR KSN	3.250.000
003-Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSNT yang berupa PPKT diintegrasikan ke dalam RTR	3.500.000
007-Rekomendasi Integrasi RTRL dengan RTRWN	1.250.000
008-Rekomendasi kebijakan KSNT Non PPKT yang Memiliki Rencana Zonasi KSNT Non PPKT yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	2.000.000
009-Rekomendasi kebijakan wilayah laut yang memiliki dokumen perencanaan pengelolaan sedimentasi	3.100.000
PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	
001-Dokumen NSPK Perencanaan Ruang Laut	1.440.000
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	1.200.000
002-Pembangunan Sistem Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	-

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	
001-Pemerintah daerah yang difasilitasi integrasi RZWP3K dengan RTRW Provinsi	3.400.000
002-Pemerintah Daerah yang dibina untuk pengelolaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	1.100.000
003-Pemerintah daerah yang difasilitasi pengelolaan sedimentasi di laut	1.000.000
12-Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	
DL-Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	
2375-Pelatihan Kelautan dan Perikanan	
QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	
641-Fasilitasi dan Pembinaan Desa Perikanan Cerdas / Smart Fisheries Village (SFV)	-
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
001-Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan	-
002-Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan	-
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
711-Peralatan dan Mesin Pelatihan Kelautan dan Perikanan	1.236.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
002-Gedung, Bangunan dan Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-
721-Gedung, Bangunan dan Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4.972.121
SCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	
831-Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih	32.685.702
2376-Pendidikan Kelautan dan Perikanan	
PDE-Akreditasi Lembaga	
541-Akreditasi Lembaga Pendidikan Kelautan dan Perikanan	1.920.000
PDI-Sertifikasi Profesi dan SDM	
545-Sertifikasi Profesi dan SDM Pendidikan Kelautan dan Perikanan	1.500.000
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
643-Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Penerapan Ilmu Pengetahuan Atau Teknologi Pendidikan Tinggi	1.348.000
QGC-Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan	
671-Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan Kelautan dan Perikanan	17.255.600

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
RAA-Sarana Bidang Pendidikan	
711-Peralatan dan Mesin Pendidikan Kelautan dan Perikanan	9.666.360
RAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
715-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	450.000
RBI-Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	
721-Gedung, Bangunan dan Prasarana Pendidikan Menengah yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200.000
RBJ-Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	
725-Gedung, Bangunan dan Prasarana Pendidikan Tinggi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	18.101.453
SAC-Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan	
811-Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	133.846.232
7020-Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	
QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	
646-Fasilitasi dan Pembinaan Desa Perikanan Cerdas/ <i>Smart Fisheries Village</i> (SFV)	500.000
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
646-Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan	27.000.000
648-Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan/Penerapan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi	1.791.405
QKA-Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat	
696-Pemantauan Sosial Ekonomi Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Lokasi Program Prioritas KKP	37.682
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
716-Peralatan dan Mesin Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	250.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
726-Gedung, Bangunan dan Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	500.000
13-Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	
EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
3989-Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
PDC-Sertifikasi Produk	
001-Sertifikat mutu produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen	2.000.000
002-Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	4.000.000
PDF-Sertifikasi Lembaga	
001-Sertifikat mutu lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer	1.880.350
002-Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	3.869.650
QIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk	
001-Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya	750.000
QIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	
001-Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem <i>traceability</i>	-
002-UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	1.000.000
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan prikanan	
001-Sarana Pengujian Mutu	500.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan prikanan	
001-Prasarana Pengujian Mutu	500.000
7010-Manajemen Mutu	
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	3.500.000
002-Rekomendasi Kebijakan Metode/Parameter uji yang dihasilkan laboratorium acuan	2.100.351
PDD-Standarisasi Lembaga	
001-Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	1.400.000
002-Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium	1.400.000
003-Unit kerja yang menerapkan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	700.000
QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
001-Masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	6.875.000

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
QIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk	
001-Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem, dan regulasi	500.000
Prioritas Nasional 5 - Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	
04-Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
7021-Pengelolaan Budi Daya Rumput Laut	
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut	1.000.000
QED-Bantuan Tanaman	
002-Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat	2.625.000
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	
001-Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat	9.350.000
002-Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - <i>'Ocean for Prosperity – Infrastructure for Coral Reef Areas</i>	10.000.000
003-Klaster Rumput Laut Berbasis Kawasan yang dibangun bagi masyarakat	-
06-Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	
EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
2357-Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	
PEE-Kemitraan	
002-Kerjasama pemasaran rumput laut	150.000
PEH-Promosi	
005-Promosi produk rumput Laut Skala Internasional	800.000
QDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri	
002-Penumbuhan Eksportir Produk Rumput Laut	300.000
Prioritas Nasional 8 - Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	
07-Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	
FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
4346-Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
PBW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	
001-Rekomendasi Pengendalian Perubahan Iklim	-
PEE-Kemitraan	
001-Jejarang dan Kemitraan Pengendalian Perubahan Iklim	-
PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	
002-Dokumen NSPK Pengendalian Perubahan Iklim	-
003-Dokumen NSPK Mitigasi Bencana	-
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
001-Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran	141.680
002-Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap mitigasi Bencana	985.830
003-Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap Dampak Perubahan Iklim	-
QEH-Bantuan Kelompok Masyarakat	
002-Bantuan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh	-
RBH-Prasarana Bidang Pengendalian Bencana	
001-Prasarana Kawasan Pesisir Tangguh	-
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	
002-Prasarana penanggulangan sampah di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	-
REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	
002-Vegetasi pantai yang ditanami untuk mitigasi bencana	-
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2363-Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	
PBW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	
004-Rekomendasi kebijakan pengelolaan wisata bahari dan BMKT	-
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	
002-Sarana Benda Muatan Kapal Tenggelm (BMKT)	-
2365-Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
001-Dokumen NSPK Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil	200.000
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
001-Masyarakat hukum adat di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dilindungi dan dikuatkan kapasitasnya	900.000
003-Masyarakat lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang difasilitasi dan dilindungi pemanfaatan ruang lautnya	1.200.000

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Effin Martiana

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 91 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2025

**RINCIAN PAGU ALOKASI ANGGARAN
PER PROGRAM DAN PER UNIT ORGANISASI ESELON I TAHUN 2025**

ANGGARAN TA 2025 (RP. 000)							
NO	UNIT ORGANISASI ESELON I	PROGRAM					JUMLAH
		PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN	NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI	KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI	DUKUNGAN MANAJEMEN	
1	SETJEN	-	-	-	-	571.248.818	571.248.818
2	ITJEN	-	-	-	-	81.913.169	81.913.169
3	DITJEN PT	808.370.410	-	-	-	451.884.165	1.260.254.575
4	DITJEN PB	581.614.521	-	-	-	356.225.133	937.839.654
5	DITJEN PSDKP	490.212.810	-	-	-	336.895.953	827.108.763
6	DITJEN PDSPKP	-	127.450.526	-	-	127.809.094	255.259.620
7	DITJEN PKRL	107.311.429	-	310.219.118	-	206.062.739	623.593.286
8	BPPSDMKP	-	-	-	259.428.155	1.061.268.048	1.320.696.203
9	BPPMHKP	-	33.575.351	-	-	309.074.385	342.649.736

ANGGARAN TA 2025 (RP. 000)							
NO	UNIT ORGANISASI ESELON I	PROGRAM					JUMLAH
		PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN	NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI	KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI	DUKUNGAN MANAJEMEN	
JUMLAH		1.987.509.170	161.025.877	310.219.118	259.428.155	3.502.381.504	6.220.563.824

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Effin Martiana